

## POLITIK ISLAM DI PERSIMPANGAN JALAN

Sebagai agama yang universal Islam tidak hanya memusatkan perhatian pada masalah ibadah, akidah dan syariah saja. Akan tetapi Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik. Bahkan persoalan pertama yang muncul dalam sejarah Islam adalah politik. Sesungguhnya, sejak berakhirnya kekuasaan Islam di tangan Muhammad Saw. sampai hari ini, persoalan politik menjadi isu strategis, selalu saja muncul berbagai peristiwa besar, baik itu perang antar saudara yang menimbulkan berbagai kerusakan telah menjadi catatan sejarah. Meminjam istilah Jalaluddin Rakhmat bahwa ternyata sepanjang sejarah umat Islam selalu bertengkar dalam urusan politik. Betapa pun demikian, tidak sedikit umat Islam yang alergi ketika diajak berbicara politik, banyak juga yang ingin memisahkan antara urusan agama dan politik.

**Azizah Publishing**  
✉ [azizahpublishing@gmail.com](mailto:azizahpublishing@gmail.com)  
[www.azizahpublishing.com](http://www.azizahpublishing.com)  
f [azizahpublishing](#)  
@azizahpublishing  
☎ 0857-4698-8935



Dedi Sahputra Napitupulu  
Rahmat Asri Sufa



## POLITIK ISLAM DI PERSIMPANGAN JALAN

Dedi Sahputra Napitupulu  
Rahmat Asri Sufa

POLITIK  
**ISLAM**  
DI PERSIMPANGAN JALAN



96 hlmn : 14 x 20 cm

© copyright 2019 Dedi Sahputra Napitupulu & Rahmat Asri Sufa

Penulis : Dedi Sahputra Napitupulu & Rahmat Asri Sufa

Editor : R. Azizah

Setting dan layout : Azizah Publishing

Desain sampul : Azizah Publishing

ISBN : 978-602-0718-62-0

Cetakan pertama : Februari 2019

**Diterbitkan oleh:**

CV. Azizah Publishing

azizahpublishing@gmail.com

www.azizahpublishing.com

**Redaksi:**

Jl. Raya Kucur Krajan RT 10 RW 05/ Kec. Dau / Kab. Malang.

Jawa Timur

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang*

*Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku tanpa seizin penerbit*

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji kita kepada-Nya yang senantiasa selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan buku ini dengan judul “Politik Islam di Persimpangan Jalan”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Muhammad ﷺ semoga kelak kita semua memperoleh syafa’atnya.

Di persimpangan jalan adalah salah satu istilah untuk mendeskripsikan kondisi yang sedang bingung, bingung karena dihadapkan pada sebuah pilihan yang tidak mungkin terelakkan. Puluhan, bahkan mungkin ratusan orang sudah yang pernah menulis dengan menggunakan istilah di persimpangan jalan. Kali ini istilah tersebut coba diurai kembali dengan kasus yang berkaitan dengan arah politik umat Islam pada kontestasi pilpres 2019 mendatang.

Sebagai agama yang universal Islam tidak hanya memusatkan perhatian pada masalah ibadah, akidah dan syariah saja. Akan tetapi Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik. Bahkan persoalan pertama yang muncul dalam sejarah Islam adalah politik. Sesungguhnya, sejak berakhirnya kekuasaan Islam di tangan Muhammad ﷺ sampai hari ini, persoalan politik menjadi isu strategis, selalu saja muncul berbagai peristiwa besar, baik itu perang antar saudara yang menimbulkan berbagai kerusakan telah menjadi catatan sejarah. Meminjam istilah Jalaluddin Rakhmat bahwa ternyata sepanjang sejarah umat Islam selalu bertengkar dalam urusan politik. Betapa pun demikian, tidak

sedikit umat Islam yang alergi ketika diajak berbicara politik, banyak juga yang ingin memisahkan antara urusan agama dan politik. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah pemilih partai Islam dan partai Nasionalis tiap kali pemilu diselenggarakan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini sesungguhnya merupakan kumpulan makalah yang pernah ditulis semasa kuliah di Pascasarjana UIN Sumatera Utara dan merupakan respon alamiah terhadap persoalan politik yang muncul belakangan ini. Buku ini ingin mendeskripsikan lintasan sejarah eksistensi perjuangan umat Islam dalam kancah perpolitikan di level Nasional, sejak awal merintis hingga zaman kontemporer hari ini.

Sebagai hasil karya manusia biasa, penulis menyadari betul bahwa masih banyak kesalahan yang terdapat dalam buku ini, karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku ini, terutama penerbit kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga kehadiran buku ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca, atau paling tidak mampu memperluas khazanah pengetahuan kita.

# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar--- 3

Daftar Isi--- 5

Pergerakan Nasional dan Organisasi Islam --- 7

Islam Pasca Pemerintahan Suharto & Arti Islam Pada Pemilu  
1999 --- 27

Kiprah Partai Islam di Pentas Nasional --- 43

Partai Islam Dan Pemilih Islam Pasca Pemerintahan Orde Baru  
Di Indonesia --- 58

Islam Di Persimpangan Jalan: Tauhid Dan Pembelaan Umat  
Islam --- 82

Profil Penulis--- 92



# PERGERAKAN NASIONAL DAN ORGANISASI ISLAM

## A. Pendahuluan

Kelahiran organisasi-organisasi Islam di Indonesia lebih banyak dikarenakan adanya dorongan oleh mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme sekaligus sebagai respon terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat pada akhir abad ke 19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Langkah pertama diwujudkan dalam bentuk kesadaran berorganisasi.<sup>1</sup> Semangat perjuangan memang harus dibangkitkan, cita-cita perjuangan mesti harus dirumuskan dengan bahasa yang dimengerti oleh rakyat. Dari tokoh-tokoh Islam kemudian membentuk semacam perkumpulan pergerakan Islam yang semula bermaksud berjuang bersama-sama rakyat dalam menghadapi penjajah, di samping juga berusaha memajukan bangsa lewat pendidikan yang kemudian diperjuangkannya. Sekalipun perkumpulan dan organisasi Islam banyak jumlahnya, namun dasarnya tetap satu yaitu Islam yang bertujuan memajukan agama Islam dan merebut kemerdekaan dari cengkraman penjajah. Dari organisasi Islam ini ditumbuhkan dan dikembangkan sikap dan rasa nasionalisme di kalangan rakyat melalui pendidikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1986), h. 157.

<sup>2</sup>Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 91.



## B. Budi Utomo

Sebagai akibat politik etis yang di dalamnya terkandung usaha memajukan pengajaran, maka pada dekade pertama abad XX bagi anak-anak Indonesia masih mengalami hambatan kekurangan dana belajar. Keadaan yang demikian ini menimbulkan keprihatinan dr. Wahidin Sudirohusodo untuk dapat menghimpun dana itu, maka pada tahun 1906-1907 melakukan propaganda berkeliling Jawa. Rupanya ide yang baik dari dr. Wahidin itu diterima dan dikembangkan oleh Sutomo, seorang mahasiswa *School tot Opleiding Voor Inlandische Arsten* (STOVIA) dan dari sinilah awal perkembangan menuju keharmonisan bagi tanah orang Jawa dan Madura. Akhirnya, Sutomo dan rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo (BU) di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Untuk merealisasikannya diperlukan pengajaran bagi orang Jawa agar mendapatkan kemajuan dan tidak dilupakan usaha membangkitkan kembali kultur Jawa, jadi antara tradisi, kultur, dan edukasi Barat dikombinasikan. Corak baru yang diperkenalkan BU adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas, dan anggota. Yang sangat menarik pada BU karena organisasi ini diikuti oleh organisasi lainnya dan dari sinilah terjadinya perubahan-perubahan sosio-politik.

Reaksi yang kurang enak datang dari orang Belanda yang tidak senang akan kelahiran “Si Molek” dan mengatakan bahwa orang Jawa makin banyak “cingcong”. Tetapi ada juga pendapat kelompok etisi yang mengatakan bahwa BU lahir wajar dan itu merupakan *renaissance* atau kebangkitan di Timur (*oostersche renaissance*) dalam arti luas kebangkitan budaya Timur. Pancaran etnonasionalisme makin membesar dan hal ini dibuktikan dalam kongres BU yang diselenggarakan pada

tanggal 3-5 Oktober 1908. Dalam waktu singkat BU terjadi perubahan orientasi.<sup>3</sup>

### **C. Sarekat Islam (SI) / Sarekat Dagang Islam (SDI)**

Sarekat Islam berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta, Jawa Tengah di era pergerakan. Organisasi ini didirikan oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto. Awalnya organisasi yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) ini didirikan atas solidaritas sesama pedagang pribumi muslim agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Organisasi ini kian membesar hingga pada tahun 1912, namun Haji Omar Said Tjokroaminoto menghilangkan kata “Dagang” sehingga terbentuklah “Sarekat Islam” disingkat SI. Pada tahun 1916, SI memperoleh badan hukum dari pemerintah kolonial. Setahun kemudian dengan statusnya sebagai partai politik, SI mengirimkan dua wakilnya ke Volksraad (Dewan Rakyat) yaitu HOS Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis.<sup>4</sup>

### **D. Muhammadiyah**

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang tergolong gerakan salafiyah. Golongan ini terkenal dengan semboyan “Kembali kepada Alquran dan hadis”. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi gerakan pemurnian Islam di Indonesia (Jawa) yang pertama kali mendapat pengakuan sebagai badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Sebagai organisasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah, Muhammadiyah mendapatkan

---

<sup>3</sup>Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 30.

<sup>4</sup>Tim Divaro dan Yugha E, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 7.

subsidi dari pemerintah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijah 1330) di Yogyakarta. Sifat gerakan ini non-politik, tetapi Muhammadiyah tidak melarang anggota-anggotanya memasuki partai politik, bahkan H. Ahmad Dahlan sendiri sebagai pemimpinnya juga menjadi anggota Sarekat Islam. Demikian juga tokoh Muhammadiyah yang lain, seperti Kiai Haji Mas Mansyur di Surabaya.

Tujuan Muhammadiyah pada waktu itu adalah menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad ﷺ Kepada penduduk bumi putera dalam residensi Yogyakarta. Dengan kata lain, pada mulanya jangkauan organisasi Muhammadiyah hanya meliputi daerah Yogyakarta. Muhammadiyah bertujuan “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.” Sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi gerakan salafiyah, Muhammadiyah dipengaruhi oleh paham Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnul Wahab dengan gerakan wahabinya, dan Muhammad Rasyid Ridha dengan tafsir dan majalah al-Manarya. Karena itu Muhammadiyah menentang apa yang mereka anggap sebagai *bid'ah* dan *khurafat*. Muhammadiyah juga menyatakan dirinya berdasarkan Alquran dan hadis, karena itu tidak terikat kepada salah satu mazhab.

Dalam bidang dakwah Muhammadiyah sangat memperhatikan masalah pendidikan. Langkah yang diambil Muhammadiyah, antara lain:

1. Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah, serta mempertinggi akhlak.
2. Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
3. Memajukan dan memperbaiki pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam.

4. Mempergiat dan menggembirakan dakwah Islam serta *amar ma'ruf nahi munkar*.
5. Mendirikan, menggembirakan, dan memelihara tempat ibadah dan wakaf.
6. Membimbing kaum wanita ke arah kesadaran dan berorganisasi.
7. Membimbing para pemuda agar menjadi orang Islam berarti.
8. Membimbing ke arah kehidupan dan penghidupan sesuai dengan ajaran Islam.
9. Menggerakkan dan menumbuhkan rasa tolong-menolong dalam kebajikan takwa.
10. Menanam kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.

Untuk mencapai cita-citanya, organisasi ini mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh untuk membicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan wakaf dan masjid, serta menerbitkan buku, brosur, surat kabar, dan majalah. Dalam mengarahkan kegiatannya, organisasi ini pada tahun-tahun pertama tidak mengadakan pembagian tugas yang jelas di antara anggota pengurus. Hal ini semata-mata disebabkan oleh ruang gerak yang masih sangat terbatas, yaitu sampai sekurang-kurangnya tahun 1917 masih di daerah Kauman Yogyakarta saja. Dahlan sendiri selain bertabligh, aktif pula mengajar di sekolah Muhammadiyah. Dan memberikan bantuan kepada fakir miskin dengan mengumpulkan dana dan pakaian untuk mereka. Dengan pengabdian yang sungguh-sungguh, penyebaran organisasi Muhammadiyah dapat berkembang pesat. Pada tahun 1925 organisasi ini telah memiliki 29 cabang dengan 4,000 anggota. Walaupun organisasi Muhammadiyah mendapatkan pengakuan hukum oleh pemerintah kolonial Belanda, hal itu tidak berarti

bahwa pemerintah senang pada organisasi ini. Karena sifat gerakannya yang dapat membangkitkan rasa kenasionalan bangsa Indonesia, pemerintah Belanda merasa perlu bersikap hati-hati terhadap gerakan ini. Muhammadiyah mempunyai berbagai majelis, biro, dan organisasi otonomi. Majelis tersebut adalah Majelis Tabligh, Majelis Tarjih, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (PKU), Majelis Pendidikan dan Pengajaran, Majelis Pustaka, Majelis Ekonomi, dan Majelis Wakaf dan kehartabendaan. Biro Organisasi, dan Biro Hubungan Luar Negeri.<sup>5</sup>

### **E. Nahdatul Ulama**

Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang eksistensinya memainkan peran penting bagi kehidupan bangsa.<sup>6</sup> NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Oleh KH. Wahab Hasbullah, yang merupakan santri muda bertubuh kecil berkulit hitam manis yang baru pulang dari Mekah pada tahun 1914. Beliau lahir di Tambak Beras, Jombang pada tahun 1888. Ayahnya bernama KH. Hasbullah<sup>7</sup>. Beliau tidak membentuk sendiri organisasi ini, bersama temannya KH. Hasyim Asy'ari mereka membentuk organisasi Nahdatut Tujjar (NT) pada tahun 1918 yang kemudian membentuk Nahdatul Ulama (NU). Sebagai organisasi dengan cara pengorganisasian yang diimajinasikan bisa 'modern', didirikannya NU tahun 1926 itu untuk menjawab dua tantangan yang saat itu sedang terjadi. Tantangan itu bernama globalisasi yang terjadi dalam dua hal : 1. Globalisasi wahabi,

---

<sup>5</sup>*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Bekasi: PT Delta Pamungkas, 2004), h. 391-393.

<sup>6</sup>Nur Khalik Ridwan, *NU & Bangsa 1914-2010* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 5.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 33.

ketika Arab Saudi dikuasai oleh kelompok wahabi dan dunia Islam banyak mengimpor gagasan-gagasan wahabi dalam bentuk pemurnian Islam, dan salafiyah dengan cara mereka masing-masing. 2. Globalisasi imperialisme fisik konvensional yang di Indonesia dilakukan Belanda, Inggris, dan Jepang, sebagaimana juga terjadi di belahan Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negeri-negeri lain yang dijajah bangsa Eropa.<sup>8</sup>

NU pada saat dilahirkan didaftarkan pada pemerintah Hindia Belanda yang disahkan oleh GR Erdbrink atas nama Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda pada tanggal 6 Februari 1930. Dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) yang akhirnya diakui pemerintah Belanda itu, perkumpulan bernama NU dilahirkan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, untuk keperluan lamanya sampai 29 tahun. Kalau dihitung sejak dilahirkannya NU pada 1926, maka keperluan 29 tahun itu berarti jatuh pada tahun 1955. Tahun ini ternyata di kemudian hari menjadi pemilu pertama yang dilakukan Pemerintah RI dan NU telah berubah menjadi partai politik.<sup>9</sup>

Maksud didirikannya NU adalah untuk memegang teguh salah satu dari mazhabnya Imam empat dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan agama Islam. Untuk mencapai maksud itu, didirikanlah ikhtiar sebagai berikut:

1. Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab.
2. Memeriksa kitab-kitab sebelumnya yang dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari kitab-kitab ahli sunnah waljama'ah atau kitab-kitab ahli bid'ah.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 45.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 46

3. Menyiarkan agama Islam berasaskan pada mazhab, dengan jalan apa saja yang baik.
4. Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasarkan agama Islam.
5. Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok, begitu juga dengan hal-hal lainnya anak yatim, dan orang-orang yang fakir miskin.
6. Dan mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, perusahaan yang tiada dilarang oleh syarak agama Islam.<sup>10</sup>

Yang boleh menjadi anggota dari perkumpulan ini adalah ulama atau guru agama dan bukan guru agama, kekuasaan tertinggi terletak di kongres yang dihadiri utusan-utusan, keputusan dalam kongres yang perlu dalam keterangan hukum agama hanya boleh diputus oleh utusan-utusan dari golongan agama. Hasil perkumpulan ini dari apa saja yang tidak dilarang agama, *statuten* ini hanya bisa diubah di kongres dan dengan suara yang terbanyak.<sup>11</sup>

Ketika NU didirikan pada tahun 1926, Indonesia masih dijajah Belanda via VOC. Pada tahun 1927 tujuan organisasi NU baru dirumuskan dan pedoman dasarnya bertanggal 5 September 1929 dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda baru pada Februari 1930. Kongres yang diadakan setelah tahun 1926-1940 berturut-turut diselenggarakan selama setahun sekali, dan setelah itu bervariasi sampai sekarang lima tahunan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 47.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 48

<sup>12</sup>*Ibid.*

## **F. MIAI DAN MASYUMI**

MIAI adalah singkatan dari Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI adalah ormas Islam yang secara resmi didirikan pada tahun 1937 berdasarkan pertemuan pada tanggal 18-21 September di Surabaya. Pemimpin MIAI pertama adalah K. H. Mas Mansyur dan Wondoamiseno dengan K. H. Hasyim Asy'ari sebagai pencetusnya. K. H. Mas Mansyur berasal dari Muhammadiyah sedangkan Wondoamiseno berasal dari Sarekat Islam. Organisasi ini berdiri saat Belanda masih menjajah Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, awalnya organisasi ini dibiarkan berkembang oleh Jepang karena golongan Islam dinilai paling anti Barat dan hanya bergerak pada bidang amal (baitul mal). Jepang juga ikut membantu MIAI dalam bentuk memberikan zakat dan mendirikan masjid.

K. H. Hasyim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif dengan 13 organisasi tergabung dalam MIAI. MIAI dapat berkembang menjadi organisasi besar yang mendapat simpati dari seluruh umat Islam Indonesia sehingga Jepang mulai mengawasi kegiatannya. Bantuan Jepang ini berhasil dimanfaatkan oleh pemuka-pemuka Islam untuk kepentingan umat Islam di Indonesia secara resmi dibubarkan Pemerintah Jepang di akhir Oktober 1943. Sebagai gantinya, dibentuklah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang dipimpin oleh K. H. Hasyim. Organisasi ini disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943. Susunan kepengurusan Masyumi adalah ketua pengurus besar dipegang oleh K. H. Hasyim Asy'ari, wakil dari Muhammadiyah adalah K. H. Mas Mansur, K. H. Farid Ma'ruf, K. H. Mukti, K. H. Hasyim, dan Kartosudarmo. Adapun wakil dari NU adalah K. H. Nachrow, Zainul Arifin, dan K. H. Mochtar. Ini merupakan wadah bagi seluruh kekuatan Islam. Pada masa pendudukan Jepang Masyumi belum menjadi partai melainkan ormas yang menyatukan umat Islam dari berbagai



ormas yang diakui Jepang pada masa itu, yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Masyumi berubah menjadi partai pada tanggal 7 November 1945 di Jogjakarta. Selain menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar Abadi pada tahun 1947.

### **G. Al-Irsyad**

Al-Irsyad merupakan perkumpulan/madrasah yang tertua dan termasyhur di Jakarta yang didirikan pada tahun 1913 oleh Perhimpunan Al-Irsyad Jakarta, tokoh pelopornya adalah Ahmad Surkati Al-Anshari. Tujuan perkumpulan Al-Irsyad ini adalah memajukan pelajaran agama Islam yang murni di kalangan bangsa Arab di Indonesia. Al-Irsyad di samping bergerak di bidang pendidikan, juga bergerak di bidang sosial dan dakwah Islam berdasarkan Alquran dan sunah secara murni dan konsekuen. Dalam bidang pendidikan, al-Irsyad mendirikan madrasah:

- a. Awaliyah, lama belajar 3 tahun (3 kelas)
- b. Ibtidaiyah, lama belajar 4 tahun (4 kelas)
- c. Tajhhiziah, lama belajar 2 tahun (2 kelas)
- d. Mua'limin, lama belajar 4 tahun (4 kelas)
- e. Takhassus, lama belajar 2 tahun (2 kelas)<sup>13</sup>

Kemudian pada tahun 1930-an al-Irsyad memberikan beasiswa untuk beberapa lulusannya untuk studi di luar negeri, terutama ke Mesir. Akan tetapi tampaknya apa yang diusahakan al-Irsyad ini kurang memenuhi harapan, sekembalinya dari studi para siswa yang diberi beasiswa tersebut tidak begitu banyak berperan. Yang banyak berperan justru mereka-mereka yang berstudi dengan biaya sendiri atau dengan bantuan

---

<sup>13</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), h. 307.

keluarganya, mereka ini cukup berperan, terutama dalam pengembangan pemikiran pembaharuan.

Gerakan al-Irsyad di bidang keagamaan juga cukup menggemparkan masyarakat Islam di Inonesia, sebab bertentangan dengan keyakinan yang ada pada waktu itu, hal ini jelas terlihat pada majalah Az-Zakhirah, yang diluncurkan sejak bulan Muharram 1342 H.<sup>14</sup>

Tidak jarang Surkati berdebat dan berhujjah mengenai bermacam-macam masalah, di mana jawaban-jawabannya senantiasa menggegerkan masyarakat dan para alim ulama pada waktu itu, sehingga membawa mereka harus kembali memeriksa dan menelaah kitab-kitab agama untuk mencari alasan atau argumentasi dalam rangka mempertahankan diri dan keyakinannya. Pada prinsipnya Syekh Ahmad Surkati mengajak ummat Islam kembali kepada Alquran dan sunah, dan menentang pendapat yang memutuskan pintu ijtihad tertutup serta mencukupi dengan empat mazhab saja yang dipegang. Hal ini disebabkan hukum Islam itu terus hidup dan berkembang sepanjang zaman, sehingga ia menentang taklid, yang pada prinsipnya membekukan hukum Islam.

Pada tahun 1940, seluruh madrasah al-Irsyad ditutup dengan alasan yang tidak begitu jelas, tapi tampaknya faktor situasi dan kondisi yang ada waktu ini tidak menguntungkan, dan persoalan-persoalan politik kemungkinan juga banyak melatarbelakangi, sebab walau bagaimanapun pada saat itu adalah masa menghebatnya perjuangan bangsa Indonesia lewat pergerakan-pergerakan untuk mencapai kemerdekaannya. Namun al-Irsyad telah mampu melahirkan guru-guru agama yang tidak sedikit jumlahnya. Dewasa ini organisasi al-Irsyad

---

<sup>14</sup>Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 115.

terus berkembang, dan bidang yang menjadi garapannya pun semakin luas, baik bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### **H. Jami'at Khairat / Al-Khairat**

Jami'at Khair didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Keanggotaan organisasi ini mayoritas orang Arab dengan tidak menutup kemungkinan kepada orang-orang Islam Indonesia lainnya untuk bergabung ke organisasi lain, tanpa ada diskriminasi di dalamnya. Umumnya orang-orang yang berada, sehingga memungkinkan penggunaan waktu mereka untuk mengembangkan organisasi tanpa mengorbankan usaha ekonomi mereka. Usaha dari organisasi ini dipusatkan pada pendidikan, dakwah dan penerbit surat kabar.<sup>16</sup>

Oleh karena perhatian Ja'miat Khair lebih ditujukan pada pendidikan, maka ada hal-hal yang sangat menjadi perhatiannya, yaitu :

- a. Pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar.
- b. Pengiriman anak-anak ke Turki untuk melanjutkan studinya.

Dari dua bidang kegiatan yang menjadi tumpuan perhatian tersebut, tampaknya yang kedua sering mendapat benturan karena kekurangan biaya, di samping juga kemunduran khilafah, dengan pengertian hampir tidak ada seorang pun dari mereka yang dikirim ke Timur Tengah

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 116-117.

<sup>16</sup>Moh. Rafa'i, *Sejarah Islam* (Semarang: Wicaksana, 1985), h. 78.

memainkan peranan yang penting setelah mereka kembali ke Indonesia.<sup>17</sup>

Pendidikan yang dikelola oleh Jami'at Khairat ini sudah termasuk maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah rakyat yang ada dikelola secara tradisional, karena pada sekolah-sekolah Dasar Jami'at Khairat pengajaran yang diberikan tidak semata-mata pengetahuan agama, porsi pelajaran umum pun diperhatikan, sehingga cukup mampu menyaingi sekolah-sekolah yang dilaksanakan pemerintah Belanda. Ada hal penting yang dapat dicatat, adalah bahwa Jami'at Khairat merupakan organisasi pertama yang memulai organisasi dengan bentuk modern dalam masyarakat Islam Indonesia, memiliki AD/ART, daftar anggota yang tercatat, rapat-rapat secara berkala, dan yang mendirikan lembaga pendidikan dengan memakai sistem yang boleh dikatakan cukup modern, di antaranya memiliki kurikulum, buku-buku pelajaran yang bergambar, kelas-kelas, pemakaian bangku, papan tulis, dan sebagainya.<sup>18</sup>

## **I. Persatuan Islam (PERSIS)**

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1923 oleh KH. Zamzam. Gagasan pendirian organisasi ini berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri yang diadakan secara berkala di rumah salah satu anggota kelompok yang berasal dari Sumatera, tetapi telah lama tinggal di Bandung. Setelah selesai berkenduri, biasanya dilanjutkan dengan berbincang-bincang tentang perosalan-persoalan agama dan gerakan-gerakan keagamaan baik yang terjadi di Inonesia maupun di negara-negara lain. Zamzam

---

<sup>17</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 69.

<sup>18</sup>Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 92-93.

sewaktu mudanya selama 3½ tahun menghabiskan waktunya untuk berstudi di Mekkah. Selama di Mekkah itulah pemikirannya banyak terpengaruh paham pembaharuan yang berkembang pada saat itu. Oleh karenanya sekembali dari Mekkah ia menjadi guru di Darul muta'allimin, sebuah sekolah agama di Bandung dan mempunyai hubungan dengan Syekh Ahmad Surkati dari al-Irsyad di Jakarta.<sup>19</sup>

Di samping menyelenggarakan pendidikan Islam berupa madrasah atau sekolah lain, Persis juga mendirikan sebuah pesantren. Pesantren Persis didirikan di Bandung pada tanggal 1 Dzulhijjah 1354 H atau bertepatan dengan Maret 1936. Pesantren itu dipimpin oleh A. Hasan sebagai kepala dan Muhammad Natsir sebagai penasihat dan guru. Tujuan pendirian pesantren ini adalah untuk mengeluarkan mubaligh-mubaligh yang sanggup menyiarkan, mengajar, membela, dan mempertahankan agama Islam. Dengan demikian diharapkan terbentuknya kader-kader yang punya kemauan keras untuk melakukan dakwah Islamiyah,<sup>20</sup> kemudian pada bulan Februari 1941 dibuka pula pesantren bagian perempuan dengan 12 orang murid, semuanya berasal dari luar Bangil. Kedua pesantren tersebut dapat berjalan dengan baik. Pada bulan Desember 1941 terjadi perang dunia kedua, sebagian murid-murid pulang ke kampung masing-masing ketika tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, Pesantren hanya tinggal beberapa orang anak laki-laki yang tidak bisa pulang kampung. Pada masa pendudukan Jepang tersebut, pesantren terpaksa ditutup. Dan pada 1 Muharram 1371 atau 3 Oktober 1951 peantren tersebut dibuka kembali secara resmi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Hasbullah, *sejarah*, h. 120.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 122.

<sup>21</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah*, h. 298.

## **J. Al-Washliyah**

Al-Jam'iyatul Washliyah didirikan di Medan pada tanggal 30 November 1930 bertepatan dengan 9 Rajab 1249 H oleh pelajar-pelajar dan para guru Maktab Islamiyah Tapanuli. Maktab Islamiyah Tapanuli ialah sebuah madrasah yang didirikan di Medan pada tanggal 19 Mei 1918 oleh masyarakat Tapanuli, merupakan madrasah yang tertua di Medan. Sebagai pengurus yang pertama pada organisasi ini adalah Ismail Banda sebagai ketua satu, A. Rahman Shihab ketua dua dan lain-lain. Sebagai penasihatnya adalah Syekh H. M. Yunus. Al-Washliyah adalah sebuah organisasi yang berasakan Islam yang dalam fiqh memakai mazhab Syafi'i serta dalam hal *i'tikaq* adalah Ahlussunnah Waljama'ah. Al-Washliyah bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan.

Usaha-usaha yang dilakukannya antara lain:

- a. Mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam.
- b. Memperbanyak tabligh, tadzkir, dan pengajaran di tengah-tengah umat Islam.
- c. Menerbitkan kitab-kitab, surat-surat kabar, majalah, surat-surat siaran, dan mengadakan taman bacaan.
- d. Membangun perguruan dan mengatur kesempurnaan pelajaran, pendidikan, dan kebudayaan.
- e. Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidik anak yatim piatu.
- f. Menyampaikan seruan Islam kepada orang-orang yang belum beragama Islam.
- g. Mendirikan, memelihara dan memperbaiki tempat ibadah.

- h. Memajukan dan menggembirakan penghidupan dengan jalan yang halal.<sup>22</sup>

Dari hasil usaha dakwahnya, banyak suku bangsa Batak memeluk agama Islam, di samping itu juga pendidikan al-Washliyah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Al-Washliyah menyelenggarakan pendidikannya dengan susunan sebagai berikut:

- a. Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun
- b. Madrasah Tsanawiyah 3 tahun
- c. Madrasah Qismul Ali 3 tahun
- d. Madrasah Mu'allimin 3 tahun
- e. PGA
- f. SD al-Wahliyah 6 tahun
- g. SMP al-Wasliyah 3 tahun
- h. SMA al-Washliyah 3 tahun

Untuk lembaga pendidikan sekolah dasar sampai SMA materi pelajarannya adalah 70 persen pengetahuan umum dan 30 persen ilmu-ilmu agama. Pada tahun 1958 al-Washliyah telah mampu mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Medan dan Jakarta. Untuk di Medan kemudian menjadi Universitas dengan banyak mempunyai cabang, seperti Sibolga, Kabanjahe, Rantau Perapat, Langsa (Aceh) dan lain-lain, bahkan sampai ke Kalimantan tepatnya di Barabai Kalimantan Selatan yang sekarang bernama STIT al-Washliyah Barabai. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa al-Washliyah sangat besar perannya dalam mensukseskan bidang pendidikan dan dakwah, hal ini akan lebih terlihat setelah Indonesia merdeka.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,. h. 72.

<sup>23</sup>Hasbullah, Sejarah, h. 123-125.

## **K. Perserikatan Ulama**

Organisasi Islam yang bernama Perserikatan Ulama ini merupakan perwujudan dari lahirnya gerakan-gerakan pembaharuan di Indonesia, dan hal ini khususnya terjadi di daerah Majalengka, Jawa Barat. Kehadiran Perserikatan Ulama ini adalah inisiatif Kiai Haji Abdul pada tahun 1911. K. H. Abdul Halim belajar agama sejak masa kanak-kanak sampai berumur 22 tahun di banyak pesantren di daerah Majalengka. Setelah itu ada ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus melanjutkan studinya. Disanalah ia mengenal tulisan-tulisan dan pemikiran pembaharuan dari Muhammad Abduh dan Jamaludin al-Afghani, yang merupakan pokok pembicaraan bersama teman-temannya yang banyak berasal dari Sumatera. Di Mekkah itu pulalah ia pertama kali mengenal K. H. Mas Mansyur yang kemudian menjadi ketua Umum Muhammadiyah. Akan tetapi dalam berbagai segi tampaknya tidak terpengaruhi oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani, hal ini dapat terlihat sampai ia meninggal dunia tahun 1962, tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i.

Termotivasinya KH. Abdul Halim dan melaksanakan berbagai kegiatannya terutama di bidang pendidikan di antaranya pengalaman selama di Mekkah di mana ia cukup terkesan dengan penyelenggaraan dua lembaga pendidikan yaitu Bab as-Salam dekat Mekkah, dan yang lainnya di Jedah. Lembaga pendidikan tersebut sudah menerapkan sistem pendidikan yang cukup maju dengan meninggalkan sistem lama yang memakai halaqah. Inilah yang mengilhaminya untuk mengadakan perubahan sistem pendidikan tradisional di daerah asalnya sekembalinya ke tanah air. Di samping itu yang juga motivasinya adalah untuk membuktikan kepada pihak keluarganya yang kebanyakan golongan priyayi (politik pendidikan pemerintah kolonial) bahwa meskipun ia dari



golongan rakyat biasa mampu melayani masyarakat dengan baik.

Setelah enam bulan kembalinya dari Tanah Suci Mekkah pada tahun 1911, Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang ia beri nama Hayatul Qulub, yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Orang-orang yang bergabung di dalamnya kebanyakan dari petani dan pedagang. Di bidang ekonomi pada mulanya organisasi ini bermaksud untuk membantu anggota-anggotanya yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina. Sedang di bidang pendidikan KH. Abdul Halim mulanya menyelenggarakan pelajaran agama sekali seminggu untuk orang-orang dewasa. Umunya materi yang diberikan adalah pelajaran-pelajaran Fiqh dan Hadis.

Organisai tersebut kemudian diganti namanya menjadi Perserikatan Ulama, yang diakui sah secara hukum oleh pemerintah pada waktu itu yaitu pada tahun 1917, dengan bantuan HOS Cokroaminoto (Pimpinan Sarekat Islam) difusikan dengan organisasi lainnya al-Ittihadiyah Islamiyah, menjadi Persatuan Ulama Islam (PUI). Perserikatan Ulama secara resmi meluaskan daerah operasinya ke seluruh Jawa dan Madura mulai tahun 1924, dan kemudian pada tahun 1937 lebih jauh lagi ke seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1932, dalam suatu kongres Perserikatan Ulama di Majalengka, Abdul Halim mengusulkan agar didirikan sebuah lembaga pendidikan yang akan melengkapi pelajar-pelajarnya, bukan saja berbagai cabang ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum tetapi juga dengan kelengkapan-kelengkapan berupa pengembangan profesi dan keterampilan seperti pekerjaan tangan, perdagangan dan pertanian, tergantung kepada bakat masing-masing yang bersangkutan. Begitulah pertumbuhan dan perkembangan Perserikatan Ulama yang dari waktu semakin

menunjuk eksistensinya dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Dan sebagaimana organisasi-organisasi yang lain, Perserikatan Ulama, sejak mulai berdirinya menyelenggarakan juga kegiatan-kegiatan tabligh, dan mulai sekitar tahun 1930 menerbitkan majalah dan brosur sebagai media untuk menyebarkan cita-citanya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Hasbullah, *Sejarah*, h.117-120.

## Daftar Pustaka

Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjend. Bimas Islam, 1986.

Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasioal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Tim Divaro dan Yugha E. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta : Erlangga, 2014.

*Ensiklopedi Nasonal Indonesia*. Bekasi: PT Delta Pamungkas. 2004.

Ridwan, Nur Khalik. *NU & Bangsa 1914-2010*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.

Rafa'i, Moh. *Sejarah Islam*, Semarang: Wicaksana, 1985.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.

# **ISLAM PASCA PEMERINTAHAN SUHARTO & ARTI ISLAM PADA PEMILU 1999**

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, namun khususnya dalam kancah politik nasional, selalu mengalami kekalahan dan tidak pernah memegang kendali pemerintahan. Sejarah membuktikan, bahwa sejak menjelang Indonesia merdeka, umat Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara. Yang menyakitkan lagi, “Piagam Jakarta” yang telah disepakati, dan di dalamnya ada tujuh kata kunci bagi umat Islam untuk dapat menjalankan syariat Islam di Indonesia baru satu hari setelah kemerdekaan diganti kembali. Perjuangan umat Islam tidak berhenti sampai di sana. Bagi para tokoh militan Islam yang tidak puas dengan Pancasila sebagai dasar negara dan digantinya Piagam Jakarta itu, mereka akhirnya mendeklarasikan sebuah Negara Islam Indonesia (NII). Namun, gerakan ini akhirnya dapat dilumpuhkan oleh pemerintah Indonesia.

Pasca Pemerintahan Suharto umat Islam telah mengalami suatu perubahan pemikiran, khususnya dalam masalah politik. Umat Islam dalam mengadakan gerakan tidak lagi merasa takut dengan adanya tuduhan-tuduhan subversif seperti yang terjadi pada era orde baru, sehingga bermunculanlah partai-partai Islam dan gagasan-gagasan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Semua itu, tiada lain merupakan salah satu wujud politik umat Islam di era Orde Reformasi.

## **B. Islam Pasca Pemerintahan Suharto**

Pembaruan dalam Islam yang timbul pada periode sejarah Islam mempunyai tujuan, yakni membawa umat Islam pada kemajuan, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Perkembangan Islam dalam sejarahnya mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Bab ini akan menguraikan perkembangan Islam pada masa pembaruan. Pada masa itu, Islam mampu menjadi pemimpin peradaban. Mungkinkah Islam mampu kembali menjadi pemimpin peradaban? Dalam bahasa Indonesia, untuk merujuk suatu kemajuan selalu dipakai kata modern, modernisasi, atau modernisme. Masyarakat barat menggunakan istilah modernisme tersebut untuk sesuatu yang mengandung arti pikiran, aliran atau paradigma baru. Istilah ini disesuaikan untuk suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan, baik oleh ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sebagian besar beragama Islam, sehingga sudah selayaknya menempatkan diri dalam membangun peradaban Islam. Mau tidak mau suatu peradaban tersebut akan terbentuk oleh umatnya. Perkembangan Islam yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam di belahan bumi lain. Membaca Islam yang di Indonesia rasanya cukup penting. Sebab, dari hasil pembacaan itu kita sebagai umat Islam dapat mengetahui akan bagaimana perkembangan Islam di Indonesia setelah Islam mengalami beberapa fase perubahan dari waktu ke waktu.

Kalau kita mau mengamati secara mendalam akan perkembangan Islam di Indonesia maka kita harus mengamati mulai dari Islam masuk, penyebaran, pengamalan, perkembangan, dan kondisi yang sekarang kita alami di Indonesia. Sebab, peristiwa sejarah merupakan problematika yang meliputi dimensi waktu masa lampau, sekarang dan masa

yang akan datang. Proses reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 diawali dengan lengsernya Soeharto. Kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Islam saat ini lebih berkecimpung pada partai-partai Islam. Di era reformasi banyak partai-partai Islam yang muncul di antaranya adalah PPP, PBB, Partai Keadilan, Partai Persatuan, Masyumi, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Abud Yatama (PAY), PSII-1905, PNU dan Partai Cinta Damai (PCD), PKB, PAN, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI). Meskipun partai-partai Islam ini tidak meraih suara terbesar, namun koalisi mereka melalui kaukus Poros Tengah dapat menghalangi tampilnya aliran dan kelompok Politikus nasionalis dan koalisinya serta memunculkan beberapa tokoh utama pada posisi-posisi strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Seperti Amin Rais sebagai ketua DPR-RI dan Gus Dur sebagai Presiden.<sup>25</sup>

Pengunduran diri Presiden Soeharto membuktikan bahwa muslim merupakan aspek yang berpengaruh dalam politik Indonesia. Pada masa reformasi muslim masih tetap memainkan peran penting yang akan mewarnai bentuk politik Indonesia. Munculnya Islam sebagai kekuatan politik berarti menegakkan Islam di arena politik.<sup>26</sup> Pasca kepemimpinan Soeharto, nampaknya era reformasi merupakan momentum yang sangat tepat untuk melahirkan ide, gagasan ataupun ekspresi dari masing-masing organisasi Islam maupun dari partai Islam. Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah tidak lagi menjadi dwi-tunggal yang mengundang perhatian banyak pengamat asing. Selain NU dan Muhammadiyah, realitasnya, ada banyak organisasi massa Islam di Indonesia, misalnya Persis

---

<sup>25</sup>H. Asyari, Dkk, *Pengantar Study Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), h. 295-296.

<sup>26</sup>Geoff Forrester, *Indonesia Pasca Soeharto* (Yogyakarta: Tajidu Press, 2002), h. 335.

atau Perti, namun memang tidak sebesar dua organisasi sebelumnya. Di bawah pimpinan Presiden Habibie, 21 Mei 1998, Kamis legi 24 Muharram 1419, hingga 20 Oktober 1999, Rabu Pon, 10 Rajab 1420, Indonesia harus melepaskan Timor-Timur. Pada sisi lain, presiden Habibie, dalam waktu relatif singkat masa pemerintahannya, menunjukkan prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi lahirnya Bank muamalah dan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Habibie, tidak dapat diragukan lagi kedekatannya dengan Ulama dan santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia-ICMI yang pertama Di Malang.<sup>27</sup>

Selain menjadi Presiden, Presiden Habibie merupakan seorang Ilmuwan Muslim di bidang Aero Dinamika. Beliau berhasil menciptakan pesawat terbang CN 35 yang mampu melakukan *short take off and landing*, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding di kelasnya di dunia. Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia.

### **C. Pembentuk ICMI**

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia disingkat ICMI adalah sebuah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia. Kelahiran ICMI bukankah sebuah kebetulan sejarah belaka, tapi erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi.

---

<sup>27</sup>Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah 2* (Bandung: Salamadani, 2010). h. 529.

Seiring dengan itu semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan alternatif bagi perkembangan peradaban dunia. Bagi Barat, kebangkitan Islam ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subyektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang bangkit kembali sehingga mengancam dominasi peradaban Barat. Kebangkitan umat Islam ditunjang dengan adanya ledakan kaum terdidik (*intellectual booming*) yang di kalangan kelas menengah kaum santri Indonesia. Program dan kebijakan Orde Baru secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan generasi baru kaum santri yang terpelajar, modern, berwawasan kosmopolitan, berbudaya kelas menengah, serta mendapat tempat pada institusi-institusi modern. Pada akhirnya kaum santri dapat masuk ke jajaran birokrasi pemerintahan yang mulanya didominasi oleh kaum bangsawan dan di beberapa tempat oleh non muslim. Posisi demikian jelas berpengaruh terhadap produk-produk kebijakan pemerintah.

Dengan kondisi yang membaik ini, maka pada dasa warsa 80-an mitos bahwa umat Islam Indonesia merupakan mayoritas tetapi secara teknikal minoritas runtuh dengan sendirinya. Sementara itu, pendidikan berbangsa dan bernegara yang diterima kaum santri di luar dan di dalam kampus telah mematangkan mereka bukan saja secara mental, tapi juga secara intelektual. Dari mereka itulah lahir *critical mass* yang responsif terhadap dinamika dan proses pembangunan yang sedang dijalankan dan juga telah memperkuat tradisi intelektual melalui pengumpulan ide dan gagasan yang diekspresikan baik melalui forum seminar maupun tulisan di media cetak dan buku-buku. Seiring dengan



itu juga terjadi perkembangan dan perubahan iklim politik yang makin kondusif bagi tumbuhnya saling pengertian antara umat Islam dengan komponen bangsa lainnya, termasuk yang berada di dalam birokrasi.

ICMI dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang tanggal 6-8 Desember 1990. Di pertemuan itu juga dipilih Baharuddin Jusuf Habibie sebagai ketua ICMI yang pertama. Kelahiran ICMI berawal dari diskusi kecil di bulan Februari 1990 di masjid kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Sekelompok mahasiswa merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, terutama kadernya, berserakannya keadaan cendekiawan muslim, sehingga menimbulkan polarisasi kepemimpinan di kalangan umat Islam. Masing-masing kelompok sibuk dengan kelompoknya sendiri, serta berjuang secara parsial sesuai dengan aliran dan profesi masing-masing.

Dari forum itu kemudian muncul gagasan untuk mengadakan simposium dengan tema “Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas” yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September - 1 Oktober 1990. Mahasiswa Unibraw yang terdiri dari Erik Salman, Ali Mudakir, M. Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal berkeliling menemui para pembicara, di antaranya Immaduddin Abdurrahim dan M. Dawam Rahardjo. Dari hasil pertemuan tersebut pemikiran mereka terus berkembang sampai muncul ide untuk membentuk wadah cendekiawan muslim yang berlingkup nasional. Kemudian para mahasiswa tersebut dengan diantar Imaduddin Abdurrahim, M. Dawam Rahardjo dan Syafii Anwar menghadap Menristek Prof. B.J. Habibie dan meminta beliau untuk memimpin wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional. Waktu itu B.J. Habibie menjawab, sebagai pribadi beliau bersedia tapi sebagai menteri harus

meminta izin dari Presiden Soeharto. Beliau juga meminta agar pencalonannya dinyatakan secara resmi melalui surat dan diperkuat dengan dukungan secara tertulis dari kalangan cendekiawan muslim. Sebanyak 49 orang cendekiawan muslim menyetujui pencalonan B.J. Habibie untuk memimpin wadah cendekiawan muslim tersebut.

Pada tanggal 27 September 1990, dalam sebuah pertemuan di rumahnya, B.J. Habibie memberitahukan bahwa usulan sebagai pimpinan wadah cendekiawan muslim itu disetujui Presiden Soeharto. Beliau juga mengusulkan agar wadah cendekiawan muslim itu diberi nama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, disingkat ICMI. Tanggal 28 September 1990, sejumlah cendekiawan muslim bertemu lagi dalam rangka persiapan simposium yang akan diselenggarakan bulan Desember. Pada tanggal 25-26 November 1990, sekitar 22 orang cendekiawan yang akan membentuk wadah baru berkumpul di Tawangmangu, Solo dalam rangka merumuskan beberapa usulan untuk GBHN 1993 dan pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua 1993-2018 serta rancangan Program Kerja dan Struktur Organisasi ICMI.

Pelaksanaan simposium sempat terganggu oleh gugatan tentang rencana B.J. Habibie sebagai calon Ketua Umum ICMI karena beliau sebagai birokrat. Kepemimpinannya dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kebebasan para cendekiawan muslim. Tanggal 30 November - 1 Desember, panitia secara khusus mengadakan rapat untuk menjawab isu negatif soal pemilihan Habibie. Dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa komitmen, pertama, berdirinya ICMI merupakan ungkapan syukur umat Islam yang mampu melahirkan sarjana dan cendekiawan. Kedua, untuk memimpin ICMI diperlukan tokoh cendekiawan muslim yang reputasi nasional dan internasional serta dapat diterima oleh umat Islam,

masyarakat Indonesia maupun pemerintah. Ketiga, hanya Unibraw salah satu wahana keilmuan yang cukup pantas melahirkan organisasi itu, apalagi pemerkasanya adalah mahasiswa universitas tersebut.

Halangan juga sempat datang dari aparat keamanan setempat. Dalam rapat gabungan antara penyelenggara, pemda dan aparat keamanan di Surabaya, empat hari menjelang acara, aparat keamanan menyoal pembentukan organisasi tersebut. ICMI, kata mereka harus diwaspadai. Tapi Abdul Aziz Hosein yang menghadiri acara tersebut sebagai panitia penyelenggara mengatakan bagaimanapun ICMI akan terbentuk karena presiden sudah menyetujui dan AD/ART-nya sudah disusun. Tanggal 7 Desember 1990 merupakan lembaran baru dalam sejarah umat Islam Indonesia di era Orde Baru, secara resmi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibentuk di Malang. Saat itu juga secara aklamasi disetujui kepemimpinan tunggal dan terpilih Bahharuddin Jusup Habibie sebagai Ketua Umum ICMI yang pertama. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa dengan berdirinya ICMI tidak berarti kita hanya memperhatikan umat Islam, tetapi mempunyai komitmen memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia, karena itu juga merupakan tugas utama.

#### **D. Arti Islam Pasca Pemilu 1999**

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilihan umum adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan rakyat, dalam rangka mengikutsertakan

rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.<sup>28</sup> Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi tersebut adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.<sup>29</sup>

Islam adalah agama samawi terakhir yang diturunkan untuk melengkapi agama-agama samawi yang sebelumnya, sehingga agama ini banyak diyakini oleh berbagai kalangan sebagai agama yang lengkap, dalam artian bahwasannya agama Islam adalah agama yang mengurus semua bentuk muamalah, bahkan dalam bernegara Islam juga sudah mengatur akan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam pandangan pemikir klasik Al-mawardi berpendapat bahwasannya kenegaraan adalah berfungsi untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Agama harus disatukan dalam solidaritas kelompok, sehingga mampu berkontribusi yang nyata bagi kekuasaan politik. Sebaliknya, bila agama dan solidaritas kelompok ini dipertentangkan, maka yang terjadi adalah disintegrasi. Jadi kalau solidaritas kelompok merupakan perintis bagi eksistensi suatu negara, maka agama agama akan menjadi penopang kekuasaan (negara) tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Hestu cipto handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), h. 208.

<sup>29</sup>Kusnardi, *Pengantar Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PD Budi Chaniago, 1988), h. 329.

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50.

Runtuhnya konstruksi kekuasaan Orde Baru membuka setitik asa Islam politik untuk bernapas dan menata ulang strategi perjuangannya. Konsolidasi antar elemen dan tokoh Islam pun diperkuat demi mencapai peluang formalisasi syariat Islam dalam negara. Islam mulai memasuki wilayah politik Indonesia sejak pertama kali negara Indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu). Dengan cara membuat suatu wadah, yaitu mendirikan partai politik. Pada waktu itu partai yang berasaskan Islam yaitu ada dua, *pertama*, Partai Masyumi dan Partai NU. Melalui wadah ini umat Islam memainkan perannya sebagai seorang politikus yang ingin menanamkan nilai-nilai Islam. Dalam tesis Harun Nasution yang berjudul *The Islamic State in Indonesia. The Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masjumi*, beliau mengemukakan bahwa ada perbedaan besar antara NU dan Masyumi. Kaum modernis di dalam Masyumi pada umumnya mereka hendak membangun suatu masyarakat muslim dan sebagai akibatnya mereka mengharapkan suatu negara Islam. Kelompok yang diwakili NU lebih sering memperjuangkan suatu negara sebagai langkah pertama dan melalui negara Islam ini mereka hendak mewujudkan suatu masyarakat Islam. Suatu perbedaan lain adalah, bahwa ulama mendapat kedudukan yang penting dalam organisasi negara konsep NU, sedangkan posisi mereka tidak begitu menonjol dalam pemikiran kaum Masyumi.<sup>31</sup>

Adanya usaha represif yang dilakukan oleh rezim orde baru, yang berkuasa selama 32 tahun, rupanya menimbulkan kekecewaan pada banyak pihak. Puncak dari keramahan tersebut adalah dengan turunnya mahasiswa ke jalan dan

---

<sup>31</sup>Sudirman, *Pembaharuan Hukum Islam: Mempertimbangkan Harun Nasution*, dalam *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam* (Jakarta: LSAF, 1989), h. 153.

menduduki gedung DPR-MPR. Yang dimotori oleh mahasiswa UIN, UGM, dan UI. Dampak dari demonstrasi tersebut membuat semakin mudarnya legitimasi politik rezim orde baru, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.<sup>32</sup> Babak baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia dimulai. Pada pemilu yang dilangsungkan tahun 1999, organisasi Islam banyak mendirikan partai politik yang berasaskan Islam dan atau berbasis umat Islam. Di antaranya: PPP, PAN, PKB, PNU, PBB, PK sekarang PKS, dll. Pada masa itu simbol-simbol agama sangat mewarnai kancah perpolitikan Indonesia. Simbol-simbol keagamaan yang diekspresikan aparatur birokrasi, tentu memiliki makna sosial. Bisa jadi ia merupakan representasi dari kesalehan dan kesadaran spiritual apparatus birokrasi, tetapi juga bukan mustahil ia juga bisa berubah menjadi sumber pengumpulan legitimasi. Hasil dari pemilu tahun 1999 tersebut membawa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden RI ke-4.

Terus bagaimana dengan Islam, yang menjadi Agama mayoritas di negeri ini? Banyak masyarakat kita yang belum sadar bahwa signifikansi kekuatan Islam di negeri ini diakui oleh negara lain, di antaranya George Mc Turnan Kahin, Fred R Von der Mehden, dan Robert W. Hefner. Kahin mengatakan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia ini tumbuh akibat lebih dari 90% bangsa Indonesia beragama Islam.<sup>33</sup> Lebih lanjut ia mencatat bahwa Islam hanya suatu ikatan yang biasa-biasa saja,

---

<sup>32</sup>Ikhar Nusa Bhakti, *Berbagai Faktor Penyebab Jatuhnya Presiden Soeharto*, dalam *Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Dedy N. Hidayat, dkk. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 61.

<sup>33</sup>Kahin, George mc turnan, *Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 50.

tetapi benar-benar merupakan semacam simbol “kelompok dalam” (in-group) untuk melawan pengganggu asing yang menindas.<sup>34</sup>

Seorang tokoh Islam Indonesia terkemuka, Muhammad Natsir. Menurutya, tanpa Islam nasionalisme Indonesia tidak pernah ada. Mengingat Islamlah yang pertama kali menanamkan benih-benih persatuan Indonesia dengan menghapuskan sikap-sikap isolasionis pulau-pulau yang beragam. Pandangan tersebut tidaklah berlebihan. Mengingat atas yang demikian itu bagi umat Islam merupakan sebuah keharusan sejarah untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman-keindonesiaan. Namun demikian juga sebuah keharusan sejarah bagi umat Islam Indonesia untuk membangun dan menata konteks kekinian bangsa dan negaranya yaitu tentang bagaimana umat manusia Islam Indonesia bersama-sama umat lainnya memberikan kontribusi dan tetap proaktif untuk itu. Dengan demikian, bangsa dan negara ini akan lebih bermartabat di mata bangsa-bangsa lainnya.

Sehingga yang demikian itu merupakan kewajiban bagi umat Islam Indonesia sebagai mayoritas anak bangsa dan kewajiban sebagai warga negara untuk selalu mampu merevitalisasi perjuangannya sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan perubahan. Tidak diragukan lagi bahwa selama ini perjuangan ummat Islam tidak pernah mengenal kata lelah dalam memperjuangkan nilai-nilai agamanya dalam rangka kemashlahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya ini tidak lain mengingat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh nilai-nilai agama akan membuat keseimbangan kehidupan dalam konteks kebangsaan maupun kenegaraannya. Sebaliknya tanpa upaya yang demikian itu akan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

menimbulkan ketimpangan dan ketidakjelasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Namun hal ini belum dapat terlaksana secara maksimal.<sup>35</sup>

Sejak pemilu tahun 1999 sampai dengan sekarang, umat Islam mulai kebingungan akan pilihan yang harus ia pegang. Sebab, semuanya mengaku bernapas Islam dan mementingkan hak rakyat. Dalam tubuh partai politik-pun banyak mengalami perebutan kepemimpinan dan atau pecah menjadi beberapa partai. Perubahan *setting* politik pasca-Orde Baru tanpa diduga memberi ruang bagi berkembangnya wacana penegakan syariat Islam di Indonesia.<sup>36</sup> Seperti yang telah dilakukan oleh Aceh, dan beberapa daerah yang menginginkan penggunaan syariat Islam. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa jejak sejarah presiden Indonesia, yang dalam kaitannya dengan arti Islam pasca pemilu 1999, telah berupaya untuk melaksanakan nilai-nilai Islam dalam berbagai hal.

## E. Kesimpulan

1. Penguduran diri Presiden Soeharto membuktikan bahwa muslim merupakan aspek yang berpengaruh dalam politik Indonesia.
2. Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi.
3. Tujuan pemilihan umum adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan

---

<sup>35</sup>Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Pustaka sinar harapan, 2003), h. 205-206.

<sup>36</sup>Arskal Salim, *Islam di Antara Dua Model Demokrasi: dalam Wajah Liberal Islam di Indonesia* (Jakarta: TUK, 2002), h. 27.



rakyat, dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.

4. Islam mulai memasuki wilayah politik Indonesia sejak pertama kali negara Indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu).
5. Sejak pemilu tahun 1999 sampai dengan sekarang, umat Islam mulai kebingungan akan pilihan yang harus ia pegang, sebab, semuanya mengaku bernapas Islam dan mementingkan hak rakyat.
6. Dalam tubuh partai politik pun banyak mengalami perebutan kepemimpinan dan atau pecah menjadi beberapa partai.
7. Perubahan *setting* politik pasca-Orde Baru tanpa diduga memberi ruang bagi berkembangnya wacana penegakan syariat Islam di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh Aceh, dan beberapa daerah yang menginginkan penggunaan syariat Islam.
8. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa jejak sejarah presiden Indonesia, yang dalam kaitannya dengan arti Islam pasca pemilu 1999, telah berupaya untuk melaksanakan nilai-nilai Islam dalam berbagai hal.

## Daftar Pustaka

H. Asyari, Dkk. *Pengantar Study Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2005.

Geoff. Forrester, *Indonesia Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Tajidu Press, 2002.

Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani, 2010.

Hestu, Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.

Kusnardi. *Pengantar Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PD Budi Chaniago, 1988.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sudirman. *Pembaharuan Hukum Islam: Mempertimbangkan Harun Nasution dalam Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*. Jakarta: LSAF, 1989.

Bhakti, Ikrar Nusa. *Berbagai Faktor Penyebab Jatuhnya Presiden Soeharto*, dalam *Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Dedy N. Hidayat, dkk. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Kahin, George mc turnan. *Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Baasir, Faisal. *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. 2003.

Salim, Arskal. *Islam di Antara Dua Model Demokrasi*, dalam: *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: TUK, 2002.

# KIPRAH PARTAI ISLAM DI PENTAS NASIONAL

## A. Pendahuluan

Berbicara mengenai partai politik Islam sebenarnya bukan barang baru, karena partai Politik Islam telah lama berpartisipasi dan ikut mewarnai sejarah perpolitikan di tanah air. Kiprah partai Islam sesungguhnya sama tuanya dengan usia Bangsa ini, bahkan jauh lebih tua. Dimulai sejak zaman kolonial Belanda yang ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam (SI) pada tanggal 11 November 1912 di Solo<sup>37</sup>. Sedangkan pada zaman Jepang kendatipun hanya singkat, merupakan episode pembukaan kembali keterlibatan umat Islam dalam dunia politik. Sumbangan terbesar Jepang adalah upaya untuk menyatukan kekuatan umat Islam melalui satu organisasi bernama Masyumi.<sup>38</sup> Jika dilacak dari rentang waktunya, maka perjalanan partai politik Islam bisa dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu: pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, orde baru, dan pasca orde baru. Ini membuktikan bahwa partai Islam telah lama berkiprah jauh sebelum negara ini merdeka. Studi ini menjadi lebih menarik karena posisi umat Islam di Indonesia menjadi sangat strategis jika dilihat melalui perspektif apa saja karena jumlahnya cukup banyak menjadikan mereka mayoritas penghuni bumi pertiwi ini.

---

<sup>37</sup>Departemen Agama Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam, *Jejak-jejak Islam Politik: Sejumlah Studi Islam di Indonesia* (Jakarta: Ditpertaiss, 2004), h. 5.

<sup>38</sup>Al Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia* (Jakarta: Darul Falah, 1998), h. 89.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi umat Islam yang sangat besar ini ternyata tidak dapat menyahuti apalagi mewakili aspirasi umat Islam itu sendiri. Banyak orang-orang Islam yang justru lebih tertarik dan bergabung dengan partai Nasionalis. Realitas yang sangat jauh dari harapan ini dapat kita buktikan melalui perolehan suara tiap kali pemilu usai. Ternyata partai Islam masih tertinggal jauh di belakang dari partai nasionalis lainnya.

Data-data dari KPU berikut ini barangkali bisa menjadi bukti konkret terhadap paparan di atas. Berdasarkan rilis data dari KPU, hasil perolehan suara secara Nasional pada pemilu tahun 2012 yang lalu menunjukkan bahwa dari partai yang bercirikan Islam atau yang diklaim sebagai partai Islam yaitu: PKB (9,04%), PKS (6,77%), PAN (7,57%), PPP (6,53%), PBB (1,46%). Jika kita bandingkan dengan partai Nasionalisme, tentu partai Islam sangat tertinggal jauh di belakang. Betapa tidak PDIP sebagai pemenang pemilu mengantongi suara (18,96%), Golkar (14,75%), Gerindra (11,8%), Demokrat (10,19%), Nasdem (6,74%), Hanura (5,27%), dan PKPI (0,91%).<sup>39</sup> Demikian seterusnya pada pertarungan dalam memperebutkan kursi di DPR tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai kepada nasional, posisi umat Islam yang mayoritas ternyata hampir berimbang dengan mereka yang bukan beragama Islam. Anggota legislatif muslim yang duduk di DPR dan DPD hari ini, justru banyak yang berasal dari partai nasionalis.

Kenyataan di atas tentu menjadi problem tersendiri khususnya bagi partai Islam yang menuntut solusi secara tepat.

---

<sup>39</sup>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Buku dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI Tahun 2014* (Jakarta: KPU, 2014), h. 29.

Betapa partai Islam hari ini hampir dilupakan dan kurang digemari oleh basis suara dan massa mereka sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Adalah sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para elit partai. Partai Islam harus memikirkan gebrakan dan inovasi apa yang akan diterapkan untuk merebut kembali hati umat Islam sekaligus berharap akan meraih kemenangan pada pemilu serentak di tahun 2019 mendatang.

## **B. Eksistensi Partai Islam**

Setelah berdirinya Syarekat Islam (SI) di zaman penjajahan kolonial Belanda, maka di awal-awal kemerdekaan tepatnya pada tanggal 4 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat memperbolehkan berdirinya partai Islam. Untuk merespon itulah kemudian Masyumi didirikan. Berdirinya Masyumi ini diharapkan sebagai satu-satunya partai politik yang akan memperjuangkan aspirasi dan nasib umat Islam di Indonesia. Partai politik ini didukung antara lain oleh dua ormas besar Islam yaitu NU dan Muhammadiyah. Namun dalam perjalanannya, satu persatu pendukung Masyumi keluar dari barisan, menyatu dan membentuk gerakan sendiri.<sup>40</sup> Cerita panjangnya bisa kita baca di berbagai literatur buku.

Keberadaan partai Islam hari ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan politik umat Islam pasca reformasi. Sejak lengsernya Suharto tahun 1998, memberikan harapan baru bagi umat Islam untuk memperoleh ruang politik yang lebih luas. Habibie mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang mendukung proses transisi menuju demokrasi di Indonesia. Menurut Azyumardi Azra, Habibie memberikan kontribusi yang signifikan untuk liberalisasi politik. Hal itu

---

<sup>40</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafitipres, 1987), h. 13.

tampak pada kebijakannya untuk memberikan kebebasan pada para tahanan politik, mengatur kebebasan pers, menghapus kebijakan penerapan pancasila sebagai asas tunggal, dan mengakhiri pembatasan jumlah partai politik.<sup>41</sup> Kebijakan politik itu tentu memberikan dampak yang berarti pada dinamika politik dan mempengaruhi pada peran umat Islam dalam percaturan politik di negeri ini.

Pasca pemerintahan Soeharto, Partai Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan, partai Islam tumbuh subur bak cendawan yang tumbuh di musim penghujan. Jika pada era sebelumnya partai politik hanya dibatasi 3 (tiga) saja, maka pasca reformasi partai Islam pun bermunculan. Hampir semua politisi memanfaatkan euforia reformasi ini, tidak ketinggalan organisasi Islam yang sebelumnya fokus pada kegiatan pendidikan dan dakwah, juga turut mensponsori berdirinya partai Islam. Menariknya hampir sepertiga jumlah partai Islam lolos untuk mengikuti pemilu di tahun 1999. Ada 42 jumlah partai Islam yang mendaftar mengikuti pemilu ketika itu.<sup>42</sup>

Yang dikategorikan sebagai partai Islam adalah partai-partai yang berasaskan Islam yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), Partai Masyumi, Partai Ummat Islam (PUI) dan lain-lain. Sebagian partai yang berasaskan Pancasila namun berbasis pada massa organisasi Islam adalah Partai Kebangkitan Bangsa

---

<sup>41</sup>Azyumardi Azra, 'Political Islam in Post-Soeharto Era', dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (editors), *Islamic Perspectives on the New Millenium*, Singapore: ISEAS, 2004, h. 140-141.

<sup>42</sup>Ahmad Fuad Fanani, *Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan Atau Menjawab Tantangan*. Dalam Jurnal Ma'arif Istitut for Culture and Humanity. Vol VIII, Desember 2013, h. 77.

(PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dari 42 partai Islam yang mendaftarkan diri mengikuti pemilu ketika itu ada 20 partai yang dinyatakan lolos. Ada hal yang patut dicatat adalah inilah era di mana umat Islam benar-benar mengekspresikan aspirasi politiknya secara formal setelah hampir 4 dekade (1959-1998) dibelenggu oleh rezim.<sup>43</sup>

Meskipun partai Islam ketika itu tumbuh subur, akan tetapi hasil perolehan suara sangat jauh dari harapan. Kegagalan Partai Islam dalam memenangkan pertarungan Nasional ini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh tokoh dan pimpinan partai Islam. Harapan mereka untuk merebut kepemimpinan nasional nampaknya sangat sulit diraih. Kondisi ini mendorong umat Islam untuk melakukan koalisi dengan partai Islam lainnya. Partai Islam membentuk poros tengah dengan mengusung Gusdur sebagai calon Presiden dengan rivalnya masing-masing yaitu Habibie dari partai Golkar dan Megawati dari partai PDIP. Setelah melalui lika-liku dan dinamika politik, serta ditolaknya laporan pertanggungjawaban Habibie oleh MPR, akhirnya Gusdur terpilih sebagai Presiden RI ke-4 pada tanggal 20 Oktober 1999 bersama Megawati sebagai wakilnya. Ketika itu yang menjadi ketua DPR adalah Akbar Tanjung, dan sebagai ketua MPR adalah Amin Rais. Saat itu banyak yang menyebut inilah masa kemenangan umat Islam.

Kejayaan Islam di panggung kekuasaan ternyata tidak bertahan lama. Setelah Gusdur dilengserkan melalui sidang istimewa MPR pada tahun 2001 oleh koalisi PDIP, Golkar dan PKB. Sesungguhnya yang menyebabkan Gusdur naik dan turun sebagai Presiden adalah kekuatan organisasi Islam

---

<sup>43</sup>Anis Rasyid Baswedan, *Political Islamic in Indonesia: Present and Future Trajectory*. Dalam Jurnal Asian Survei, Vol. XXXIV, September 2004, h. 672.



*mainstreamnya* itu NU dan Muhammadiyah.<sup>44</sup> Terpilihnya Megawati dan Hamza Haz sebagai Presiden dan wakil Presiden pengganti Gusdur juga masih dianggap sebagai keberhasilan umat Islam di pentas perpolitikan negeri ini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa partai Islam sangat berperan dan diperhitungkan pada level Nasional.

Pada pemilu 2004 suara partai Islam meningkat sedikit dibanding tahun 1999 yaitu dari 36,3% menjadi 41%. Pada pemilu kali ini banyak partai Islam yang bertumbangan, hanya satu partai yang mendapat lonjakan suara yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya adalah Partai Keadilan (PK). Sebagai pemenang pemilu pada tahun 2004 adalah partai Golkar dengan perolehan suara 21,6%, disusul PDIP, 18,5% dan partai Demokrat 7,45%.<sup>45</sup> Meskipun partai Islam tidak jadi partai pemenang, tetapi posisi partai Islam tetap menjadi perhitungan. Hampir semua kandidat calon presiden ketika itu sangat memperhatikan sentimen dan isu Islam. Sehingga semua kandidat menjalin koalisi dengan partai Islam, jika calon Presidennya dari partai Nasionalisme, maka wakilnya berasal dari partai Islam. Demikian juga sebaliknya. Ini menjadi bukti bahwa di panggung Nasional partai Islam masih sangat diperhitungkan.

Demikian juga pada pemilu tahun 2009, pemilu kali ini merupakan perhelatan paling akbar dalam sejarah kontes perpolitikan di Indonesia. Jumlah partai politik yang mengikuti pemilu sebanyak 44 partai, setelah disaring oleh KPU maka yang berhasil lolos dan berhak mengikuti pemilu adalah 9 partai saja

---

<sup>44</sup>Azyumardi Azra, *Islam, Indonesia, and Democracy* (Jakarta: ICIP & Equinox Publishing, 2006),h. 124.

<sup>45</sup>Komisi Pemilihan Umum:  
<http://www.kpu.go.id/suara/hasilsuara-dpr-sah.php>. Diakses pada 2 Januari 2017.

yaitu, Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Lagi-lagi partai Islam harus puas pada posisi empat besar, PKS (7,88%), PAN (6,01%), PPP (5,32%) dan PKB (4,94%). Pemilu tahun 2009 ini dimenangkan oleh partai Demokrat (20,85%), disusul Golkar (14,45%), PDIP (14,03%).<sup>46</sup> Dengan keberhasilan Demokrat menduduki ranking pertama, maka SBY berhasil menduduki tampuk kekuasaan untuk kedua kalinya dengan wakil yang berbeda yaitu Budiono, setelah pada periode sebelumnya bersama Jusuf Kalla.

Data berikut ini merupakan data terakhir dari KPU pada pemilu tahun 2014 yang lalu, jumlah partai peserta pemilu sebanyak 12 partai dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut: Nasdem (6,74%), PKB (9,04%), PKS (6,77%), PDIP (18,96%), Golkar (14,75%), Gerindra (11,81%), Demokrat (10,19%), PAN (7,57%), PPP (6,53%), Hanura (5,27%), PBB (1,46%), PKPI (0,91%).<sup>47</sup> Pemilu tahun 2014 dimenangkan oleh PDIP yang berhasil mengantarkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI. Dari data di atas partai Islam hanya memperoleh 31,37% suara secara Nasional. Kenyataan ini merupakan kekalahan telak partai Islam atas partai Nasional.

Begitulah perjalanan panjang perpolitikan umat Islam, kenyataan historis menunjukkan bahwa betapa umat Islam perlu bersatu dan menyadari bahwa mereka memang harus bersatu. Jika potensi umat Islam yang menurut data statistik terakhir lebih dari 85% mendiami wilayah Republik ini

---

<sup>46</sup>Komisi Pemilihan Umum:  
<http://www.kpu.go.id/suara/hasilempilu/legislatif-2009.php>. Diakses pada 2 Januari 2017.

<sup>47</sup>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Buku dan Infografik Pemilu*, h. 30.

berkoalisi maka kejayaan Islam akan berhasil ditegakkan. Namun, wacana di atas tidaklah serta merta bisa dilaksanakan, perlu *lobby-lobby* politik yang kuat. Untuk mengawali kesuksesan tersebut perlu penyadaran bagi seluruh umat Islam agar lebih tendensius kepada partai yang berbasis agamanya sendiri, di samping itu partai Islam juga harus memperbaiki kinerja mereka.

### **C. Problem Partai Islam**

Jika kita melacak kembali sejarah panjang perpolitikan di Indonesia, maka akan kita temui berbagai persoalan yang dihadapi oleh partai Islam. Walaupun partai Islam selalu diajak bergabung dengan pemerintahan, ternyata hal tersebut tidak berdampak pada perolehan suara ketika pemilu. Problem utamanya adalah partai Islam kurang mendapatkan dukungan dari basis massa mereka sendiri. Kenyataan politik ini tentu sangat ironis dan menjadi pukulan telak bagi partai Islam. Pada saat yang sama dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah juga tidak memberikan dukungan sepenuhnya kepada partai Islam. Parahnya lagi banyak tokoh dari NU, Muhammadiyah dan HMI yang menjadi pejabat teras pada partai Nasionalis.

Lemahnya kaderisasi di tubuh partai Islam juga menjadi penyebab mengapa mereka kurang mendapat dukungan. Partai Islam kurang bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai pemimpin yang kharismatik. Sehingga kepopuleran dan kewibawaan pimpinan partai Islam jauh tertinggal di bawah partai Nasionalis. Katakanlah seperti SBY, Megawati, dan Prabowo, sampai hari ini tidak ada yang bisa menandingi kharisma ketiga tokoh partai politik Nasionalis ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan konflik internal partai Islam yang menyebabkan dualisme kepengurusan partai. Kisruh yang

terjadi di PPP hari ini merupakan contoh konkret yang bisa kita saksikan. Adanya dualisme kepengurusan PPP antara Romahurmuji dengan Yanfarij menambah permasalahan begitu kompleks dan menyebabkan orang semakin tidak tertarik dengan partai Islam. Akibatnya partai Islam terlalu mengurus tenaga mereka untuk menyelesaikan konflik internal, ujungnya adalah mereka kehabisan tenaga untuk membuat program kerja yang bermanfaat bagi umat.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh pimpinan partai Islam yang terjadi belakangan ini justru sangat memperkeruh citra umat Islam. Dampaknya masyarakat kian menjauhi partai Islam. Misalnya, pimpinan partai PPP Surya Darma Ali yang terbukti melakukan korupsi dana haji dan tertangkapnya Luthfi Hasan Ishaq karena kasus impor daging sapi adalah fakta di lapangan yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Inilah yang menjadi penyebab umat Islam semakin alergi ketika mendengar nama partai Islam. Seperti yang dikatakan oleh Syafi'i Maarif, hal ini disebabkan tidak sesuainya laku dan kata pada tokoh-tokoh partai Islam. Sehingga banyak yang menganggap bahwa politik para tokoh partai Islam tidak ubahnya seperti para elit partai lain yang tuna-moral dan tuna-tanggungjawab dalam mengayomi proses demokrasi di Indonesia.<sup>48</sup>

Adapun persoalan klasik bagi sekelompok umat Islam yang alergi terhadap partai merupakan bagian yang sangat kecil dari persoalan di atas. Bahwa ada kelompok radikal yang menginginkan agar sistem pemerintahan harus berdasarkan syari'at Islam. Para elit partai Islam hanya perlu melakukan penyadaran kepada umat ini bahwa Indonesia bukanlah Negara

---

<sup>48</sup>Ahmad Syafi'i Maarif, *Demokras: Si Pincang Diantara Si Lumpuh* Dalam Jurnal Ma'arif Istitut for Culture and Humanity. Vol VI, Desember 2011, h. 8-10.

Islam, Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang berasaskan Pancasila. Demokrasi dan pancasila jika dipahami secara hakiki, sesungguhnya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam Seperti yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno bahwa agama dan demokrasi dapat bersatu.<sup>49</sup>

Berbagai persoalan yang menimpa partai Islam saat ini merupakan hal yang sangat serius. Jika ini tidak segera diselesaikan maka akan semakin menambah jauh ketertinggalan partai Islam di pentas Nasional. Partai Islam saat ini perlu menyadari betapa konflik internal yang terjadi di rumah mereka merupakan 'PR' besar untuk segera dituntaskan. Partai Islam harus membangun anggota yang solid terlebih dahulu, baru kemudian bersama-sama turun ke jalan memperkenalkan visi baru.

#### **D. Strategi Partai Islam dalam Memenangkan Pemilu**

Kenyataan pahit yang dihadapi oleh partai Islam tidak harus membuat mereka pesimis, tetapi mereka harus optimis menentekukan visi ke depannya. Paling tidak ada dua strategi yang harus dilakukan oleh partai Islam dalam menghadapi pemilu mendatang yakni peningkatan partisipasi umat dan koalisi partai-partai Islam.<sup>50</sup> Potensi umat Islam yang mayoritas ini harus dimanfaatkan oleh partai Islam, selama ini banyak mayarakat Muslim yang lebih tertarik bergabung dengan partai Nasionalis daripada partai Islam itu sendiri. Paradigma seperti ini harus segera dirubah melalui pendekatan-pendekatan khusus. Partai-partai Islam juga sebaiknya melakukan koalisi

---

<sup>49</sup>Badri Yatim, *Sukarno, Islam, dan Nasionalisme* (Bandung: Nuansa, 2001), h. 144.

<sup>50</sup>Bambang Cipto, *Partai, Kekuasaan, dan Militerisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 63-65.

sesama mereka, dengan demikian suara umat Islam tidak akan terpecah.

Mendekati kembali masyarakat Muslim dengan cara-cara yang lebih religius merupakan salah satu cara untuk dapat menarik kembali simpati umat Islam. Di samping itu, partai politik Islam harus menunjukkan performa mereka dengan kinerja yang lebih baik. Partai politik Islam juga perlu mengetahui bagaimana problem dan kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya itu partai Islam harus bisa mengikuti perkembangan arus globalisasi yang semakin hari kian berkembang. Tidak lagi terjebak pada isu masa tradisional Islam, syariat Islam, negara Islam dan isu-isu formal lainnya. Untuk itu, perlu dirumuskan kembali visi misi strategis untuk meraih kemenangan pada pemilu mendatang.

Setelah merumuskan visi misi strategis, partai Islam perlu mengambil kebijakan yang populer seperti pendidikan gratis, pelayanan kesehatan yang memadai dan gratis, membuka banyak lapangan pekerjaan, jaminan sosial, dan keamanan serta lain-lainnya yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hal ini lebih penting daripada sekadar menunjukkan simbol-simbol Islam ke permukaan yang akan menyebabkan kecemburuan sosial. Partai Islam hendaknya tidak menjadikan paradigma kekuasaan sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Walaupun sedang tidak berada di pemerintahan, harus tetap mendukung pemerintah dengan cara membuat program yang pro rakyat. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Cak Nur, menjadi oposisi sebenarnya sama mulianya dengan duduk di pemerintahan. Bahkan, bahkan jadi oposisi bisa lebih mulia dengan mengakar ke bawah.<sup>51</sup> Daripada

---

<sup>51</sup>Nurcholis Majid, *Membangun Oposisi, Menjaga Demokratisasi* (Jakarta: Voice Indonesia, 2000), h. 8-10.

duduk di kekuasaan tidak melakukan program yang bermanfaat bagi umat banyak. Hal ini harus terus dilakukan oleh partai Islam, jika tidak berhasil di tingkat pusat, maka pada tingkat lokal, program-program pro rakyat harus selalu digalakkan dan tidak hanya tergantung pada kampanye yang hanya dilakukan lima tahun sekali saja.

Partai Islam harus menyadari bahwa posisi mereka sekarang yang berada pada pemerintahan Jokowi-Jk, tidak menjamin bahwa mereka akan memperoleh kemenangan pada pemilu mendatang. Jika pemerintahan hari ini berhasil maka yang dipuji adalah partai PDIP sebagai pengusung presiden dan wakilnya. Namun ketika partai mendapat kritikan, maka semua partai tidak hanya pengusung tetapi yang terlibat dalam lingkaran koalisi akan terkena imbasnya. Oleh karena itu pada semua tingkatan partai Islam harus selalu eksis di tengah masyarakat.

Hal yang paling penting juga harus dilakukan oleh partai Islam adalah bagaimana mereka turut serta menjawab tantangan dan persoalan bangsa yang ada hari ini meskipun berlabelkan dan berasaskan Islam, partai Islam harus menyadari bahwa mereka hidup dalam Negara yang plural. Sejak awal negara Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi Negara yang berasaskan Pancasila dan nilai-nilai agama. Meskipun masa Islam mayoritas, tetapi hak-hak minoritas harus tetap dilindungi sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

## **E. Penutup**

Artikel ini telah berupaya menjelaskan eksistensi partai Islam dari waktu ke waktu melalui pendekatan historis. Demikian juga, artikel ini telah mengupas sedikit mengenai problem dan strategi yang harus dilakukan oleh partai Islam.

Keberadaan partai Islam dalam pentas demokrasi di Indonesia merupakan catatan sejarah tersendiri. Terlepas dari hasilnya sesuai atau tidak sebagaimana yang diharapkan, yang jelas partai Islam cukup banyak memberikan warna bagi perpolitikan di negeri ini. Berbagai persoalan yang terjadi seharusnya bukan malah membuat partai Islam semakin lemah tetapi itu merupakan tantangan tersendiri bagi partai Islam untuk lebih baik ke depannya. Strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan di atas adalah dengan melakukan perbaikan di tubuh internal partai, memperbaiki citra partai Islam, perbaikan sistem kaderisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program yang pro terhadap umat. Tentunya ini hanyalah merupakan sebuah tawaran saja bagi partai Islam, semuanya kembali kepada pengurus dan aktivis partai Islam.



## Daftar Pustaka

Al Chaidar. *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia*, Jakarta: Darul Falah, 1998.

Azra, Azyumardi. *Islam, Indonesia, and Democracy*. Jakarta: ICIP & Equinox Publishing, 2006.

\_\_\_\_\_. *Political Islam in Post-Soeharto Era*. dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (editors), *Islamic Perspectives on the New Millenium*. Singapore: ISEAS, 2004.

Baswedan, Anis Rasyid. "Political Islamic in Indonesia: Present and Future Trajectory". dalam *Asian Survei*, Vol. XXXIV, 2004.

Cipto, Bambang. *Partai, Kekuasaan, dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Departemen Agama Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam. *Jejak-jejak Islam Politik: Sejumlah Studi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditpertaiss, 2004.

Fanani, Ahmad Fuad. "Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan Atau Menjawab Tantangan". dalam *Ma'arif Istitut for Culture and Humanity*. Vol VIII, 2013.

<http://www.kpu.go.id>.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Buku dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI Tahun 2014*, Jakarta: KPU, 2014.

Maarif, Ahmad Syafi'i. "Demokras: Si Pincang Di antara Si Lumpuh". *Ma'arif Institut for Culture and Humanity*. Vol VI, 2011.

Majid, Nurcholis. *Membangun Oposisi, Menjaga Demokratisasi*. Jakarta: Voice Indonesia, 2000.

Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafitipres, 1987.

Yatim, Badri. *Sukarno, Islam dan Nasionalisme*. Bandung: Nuansa, 2001.

# PARTAI ISLAM DAN PEMILIH ISLAM PASCA PEMERINTAHAN ORDE BARU DI INDONESIA

## A. Pendahuluan

Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pada pasca Orde Baru, ada beberapa faktor yang menjadi penjelaras, yaitu faktor teologis, historis, sosiologis, dan faktor reformasi. *Pertama*, faktor teologis. Dalam pandangan ini agama merupakan suatu yang *integrated*, yang bersatu tak terpisahkan dengan politik. Islam adalah *din wa daulah*, berdasarkan ini maka masalah kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah negara atau politik, merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agama. Sebagai manifestasi dari pandangan ini adalah perlunya kekuasaan politik. Kekuasaan ini diperlukan dalam upaya untuk menerapkan syariat Islam, hukum-hukum Islam, baik perdata maupun pidana. Dalam rangka itu maka diperlukan partai politik untuk memperjuangkan dan menegakkan syariat Islam. Dengan demikian, pendirian partai politik Islam merupakan panggilan dan perwujudan dari pandangan teologis tentang hubungan agama dan negara.

*Kedua*, faktor sosiologis. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas. Pemeluknya mencapai sekitar 90% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 200 juta orang. Dengan jumlah yang mayoritas tersebut sudah sepantasnya dalam upaya penyaluran aspirasi politik sesuai dengan nilai-nilai dan perjuangan Islam. Dalam konteks ini maka partai politik Islam dianggap sebagai wadah penyalur

aspirasi perjuangan Islam. Sehubungan dengan itu maka pendirian partai politik Islam merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini karena secara sosiologis umat Islam di Indonesia merupakan pemeluk mayoritas dan mereka akan merasa nyaman dan aman apabila penyaluran aspirasi politik disampaikan melalui partai politik Islam. Konteks sosiologis ini tampaknya digunakan oleh elit-elit politik Islam untuk mendirikan partai politik Islam. Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas tentu dengan sendirinya akan mendapat dukungan dari umat Islam. Oleh karena itu adanya partai-partai politik Islam secara otomatis akan didukung oleh umat Islam. Apalagi ditambah dengan perspektif teologis, di mana perlunya alat perjuangan untuk mewujudkan aspirasi Islam. Dengan konteks ini maka antara faktor sosiologis dan teologis bertemu, saling mengisi dan menunjang satu sama lain.

*Ketiga*, faktor historis. Dalam sejarah di Indonesia Islam merupakan suatu kekuatan yang sangat berperan dalam perlawanan menentang penjajah. Islam pada masa itu merupakan salah satu garda terdepan dalam mengusir penjajahan. Dalam rangka mengusir penjajahan tersebut diperlukan alat organisasi sebagai penyatu aspirasi dan tujuan. Maka tercatatlah berdirinya Sarekat Islam (SI), organisasi pertama kekuatan politik yang anggotanya terbanyak di antara organisasi-organisasi pergerakan lainnya.

## **B. Islam dan Politik: Pendekatan Teoritis**

Dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma.<sup>52</sup> *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan

---

<sup>52</sup>Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 30.

negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*sekularistik*). Paradigma pertama yang menyatakan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena melihat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga mencakup politik atau negara. Tuhan melalui Nabi Muhammad telah menurunkan aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Karena Tuhan Maha Benar dan Maha Adil, maka aturan-aturan-Nya pastilah benar dan adil. Karena manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi, maka manusia berkewajiban untuk mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu manusia harus taat dan tunduk pada Tuhan. Berdasarkan itu maka untuk mengelola negara, tinggal melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam pandangan kelompok ini, syari'ah dipahami sebagai totalitas yang *par excellent* bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Karena itu legitimasi politik negara harus berdasarkan syari'ah.

Pendekatan *kedua* yang menyatakan bahwa antara agama dan negara saling terkait dan berhubungan berdasarkan pada argumen bahwa agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Begitupun, negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. 2 Para pemikir Islam yang termasuk dalam paradigma ini antara lain adalah Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, dan Al- Ghazali.

*Ketiga* adalah paradigma yang menyatakan perlunya adanya pemisahan antara agama dan negara. Paradigma ini menolak paradigma yang pertama dan paradigma yang kedua. Pelopor paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq, ulama dan pemikir dari Mesir. Dalam kalangan Islam, pemikiran tentang pemisahan antara agama dan negara yang dikemukakan oleh Ali Abdul Raziq ini bukan saja ditolak, tetapi juga bersifat kontroversial karena pandangan-pandangan dan hujah-hujah yang dilontarkannya tidak sesuai dengan sumber dan fakta yang ada. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam Wa Usul al-Hukm* mengemukakan bahwa: (1) Syari'at Islam semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi; (2) Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan pada periode Nabi maupun Khulafaur Rashidin; (3) Kehkhalifahan bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi; (4) Kekhalifahan tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.<sup>53</sup>

Dalam bagian lain, Ali Abdul Raziq menolak keras pendapat bahwa Nabi pernah mendirikan negara Islam. Menurutnya, Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah. Misi dari Nabi Muhammad adalah semata-mata utusan Tuhan. Ia bukan seorang kepala negara atau pemimpin politik. Pendapat Ali Abdul Raziq tersebut mendapat kritikan tajam dari Dhiya Din Rais. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa al-Khalifah f i al-'Ashr al-Hadist*, ia mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Ali Abdul Raziq hanyalah sekadar pernyataan-pernyataan kosong tanpa pijakan dalil. Ali Abdul Raziq lebih

---

<sup>53</sup>Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, Vol. IV, No.2, Tahun 1993.

layak disebut sebagai dongeng dan khurafat. Di sini Dhiya Din memberikan bukti-bukti dengan mengutip dalil dan kesepakatan atau ijma ulama tentang adanya negara Islam dan bahwa Nabi bukan hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai Kepala Negara.

Meskipun tulisan Ali Abdul Raziq mendapat kecaman dan kritikan, tetapi garis pemikirannya terus berlanjut. Di antaranya yang segaris dengan pemikiran Raziq adalah Thoha Husein dan Qomaruddin Khan. Thoha Husein berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mengatur sistem pemerintahan baik secara umum maupun secara khusus. Pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafaur Rashidin bukanlah pemerintahan yang didasarkan pada wahyu, tetapi pemerintahan insani, sehingga tidak pantas dianggap sakral dan suci.<sup>54</sup>

Sedangkan Qamaruddin Khan berpendapat bahwa teori politik Islam tidak muncul dari Al-Qur'an tetapi dari keadaan dan bahwa negara bukanlah merupakan hal yang dipaksakan secara Ilahiah ataupun sangat dibutuhkan sebagai institusi sosial. Kaum muslimin perlu memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang telah tertetapan mengenai percampuran agama dan politik. Klaim bahwa Islam merupakan sebuah panduan agama dan politik yang harmonis adalah sebuah slogan modern, yang jejaknya tidak dapat ditemukan dalam sejarah masa lalu Islam, Istilah "Negara Islam" tidak pernah digunakan dalam teori atau praktik ilmu politik muslim sebelum abad ke-20.

Eickleman dan Piscatori sendiri tampak setuju dengan pendapat di atas. Hal ini terlihat dari ketidaksetujuannya

---

<sup>54</sup>Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekulerisme: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thoha Husein* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 48.

dengan konsep menyatunya agama dan politik. Dalam konteks ini mereka memberikan beberapa alasan. *Pertama*, ia melebih-lebihkan keunikan politik muslim. Agama jelas merupakan perkara penting bagi kehidupan politik rakyat seluruh dunia, tidak hanya bagi umat Islam. *Kedua*, penekanan pada *al-din wa al-daulah* tanpa disadari mengekalkan prasangka para orientalis bahwa politik muslim tidak seperti politik lain, adalah tidak diarahkan oleh perhitungan-perhitungan berdasarkan kepentingan rasional. *Ketiga*, asumsi-asumsi *al-din wa al-daulah* memberi kontribusi terhadap pendapat bahwa politik muslim adalah sebuah jaringan tidak bertepi, tidak bisa dibedakan bagian-bagiannya karena saling interpenetrasi antara agama dan politik. Abdel Wahab juga setuju bahwa konsep negara Islam harus ditinggalkan sama sekali. Juga harus meninggalkan ilusi milenium yang dijanjikan oleh pembaharu negara utopia yang menghadirkan orang salih dan suci secara ajaib untuk mengembalikan zaman keemasan Islam yang sudah lama hilang. Kesalahpahaman utama pemikir politik Islam kontemporer terletak pada asumsi bahwa negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam tidak lain adalah negara yang memaksakan untuk hidup sesuai dengan Islam. Yang benar adalah tujuan komunitas politik Islam untuk memberi kemungkinan kepada umat Islam secara individual untuk hidup sesuai Islam dan melindungi mereka dari paksaan yang cenderung meruntuhkan komitmen mereka pada Islam.<sup>55</sup>

Dari keseluruhan penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam pemikiran politik Islam, masalah hubungan agama dan negara, terdapat tiga paradigma, yaitu paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan

---

<sup>55</sup> Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim* (Bandung: Mizan, 1998), h. 67-68.



kesatuan yang tidak terpisahkan, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan, dan paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah.<sup>a</sup> Dalam kaitan dengan tulisan ini pembahasan difokuskan pada paradigme pertama, yaitu bersatunya antara agama dan negara atau politik. Paradigma ini disebut pula sebagai *integrated paradigm*. Paradigma ini berpandangan bahwa antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga mencakup politik atau negara. Tuhan melalui Nabi Muhammad telah menurunkan aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Karena Tuhan Maha Benar dan Maha Adil, maka aturan-aturan-Nya pastilah benar dan adil.<sup>56</sup> Karena manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi, maka manusia berkewajiban untuk mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu manusia harus taat dan tunduk pada Tuhan. Berdasarkan itu maka untuk mengelola negara, tinggal melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam pandangan kelompok ini, syari'ah (hukum Islam) dipahami sebagai totalitas yang *par excelent* bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Karena itu legitimasi politik negara harus berdasarkan syari'ah (hukum Islam).

Paradigma bersatunya agama dan negara ini dalam melakukan praktik politik menggunakan pendekatan formalistik. Pendekatan formalistik adalah pendekatan yang

---

<sup>56</sup> Abdel wahab el-Affendy, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 89-90.

cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang negara dengan simbolisme keagamaan, berbeda dengan pendekatan substansialistik yang cenderung menekankan isi daripada bentuk.

Pendekatan substansialistik tidak mempersoalkan bagaimana bentuk atau format dari negara itu, tetapi memusatkan perhatian kepada bagaimana mengisinya dengan etika dan moralitas agama. Dalam konteks politik, menurut M. Syafii Anwar, pendekatan formalistik menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik yang dibayangkan (*imagined Islamic polity*), seperti terwujudnya suatu sistem politik Islam, munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik Islam, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu maka mereka sangat menekankan ideologisasi dan politisasi simbolisme keagamaan secara formal. Doktrin keagamaan diterjemahkan bukan sekadar rumusan teologis tetapi juga suatu sistem keimanan dan tindakan politik yang komprehensif dan eksklusif. Secara garis besar pendekatan formalistik ini berpandangan: Islam harus menjadi dasar negara, syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, dan sistem politik modern diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan negara Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 144-145.

### C. Genelogi Partai Politik Islam di Indonesia

Setelah keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang memperbolehkan berdirinya partai-partai politik, umat Islam merespon Maklumat tersebut dengan mendirikan partai politik Masyumi. Berdirinya Masyumi ini dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik yang akan memperjuangkan aspirasi dan nasib umat Islam Indonesia. Partai politik ini didukung, antara lain, oleh dua kekuatan ormas besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah.<sup>58</sup>

Namun dalam perjalanannya, para pendukung partai Masyumi keluar satu persatu. Bermula dengan keluarnya PSII tahun 1947, menyusul kemudian NU tahun 1952. Akibatnya pada Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama semenjak Indonesia merdeka, kekuatan politik Islam menjadi terpecah-pecah, bukan hanya Masyumi, NU, PSII, Perti, tetapi juga ada PPTI, dan AKUI. Tentu saja perpecahan di kalangan partai-partai Islam ini mengakibatkan kekuatan Islam menjadi lemah. Dampak perpecahan itu pada gilirannya akan membuat umat Islam menjadi bingung karena siapa sesungguhnya yang menjadi representasi dari Islam. Ini terjadi karena partai-partai Islam itu semuanya mengklaim sebagai perwujudan representasi dan aspirasi Islam. Hasil pemilu menunjukkan ternyata partai-partai Islam tidak memperoleh dukungan suara mayoritas dari umat Islam. Masyumi hanya memperoleh suara 20,9%, NU 8,4%, PSII 2,0%, Perti 1,3%, serta PPTI dan AKUI masing-masing memperoleh suara 0,2%.

Masa Demokrasi Terpimpin, partai-partai Islam dipaksa untuk mendukung ideologi Nasakom. Dalam hal ini partai-partai Islam terpecah atas dua kelompok, yaitu kelompok yang

---

<sup>58</sup>Abdul Mu'nim D.Z, *Islam di Tengah Arus Transisi* (Jakarta: Kompas, 2000), h. 30.

mendukung ideologi Nasakom yang diwakili oleh NU dan kelompok yang menentang yang diwakili oleh Masyumi. Akibat penolakan itu, pada tahun 1960 Soekarno membubarkan Masyumi. Dengan bubarnya Masyumi praktis kekuatan politik Islam terpinggirkan dari arena kekuasaan. Hal ini karena meskipun NU berada dalam lingkaran kekuasaan, ternyata ia tidak mempunyai peranan dan kekuatan apa pun. Ketika Orde Baru tampil memegang kendali kekuasaan, umat Islam mempunyai harapan besar akan tampilnya kembali Masyumi. Harapan itu berubah menjadi kekecewaan karena rezim Orde Baru tidak memperbolehkan Masyumi tampil kembali sebagai partai politik.<sup>59</sup>

Sebagai gantinya, rezim Orde Baru mengizinkan berdirinya Parmusi. Itu pun dengan catatan: tokoh-tokoh eks-Masyumi dilarang terlibat dalam kepengurusan partai. Tindakan pemerintah ternyata tidak hanya sampai di situ. Demi alasan menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, Orde Baru kemudian melakukan restrukturisasi sistem kepartaian. Dengan adanya kebijaksanaan ini, partai-partai Islam (Parmusi, NU, PSII, dan Perti) dan juga partai-partai yang lainnya (PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan IPKI) dipaksa melakukan fusi. Keempat partai Islam yaitu Parmusi, NU, PSII dan Perti bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian PPP merupakan satu-satunya kekuatan politik Islam.<sup>60</sup>

Proses marginalisasi yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap Islam politik ternyata terus berlanjut, yaitu dengan

---

<sup>59</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafitipers, 1987), h. 72.

<sup>60</sup>Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan baru Islam*, (Jakarta: Mizan, 1986), h. 108.

mengeluarkan kebijakan deideologisasi. Dalam kebijaksanaan ini, partai-partai politik tidak diperbolehkan menggunakan asas lain selain asas Pancasila. Akibat kebijaksanaan itu maka partai-partai politik tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya PPP, sebagai benteng terakhir kekuatan politik Islam, menanggalkan asas Islam dan menggantinya dengan asas Pancasila. Begitu pun dengan lambangnya dari “Ka’bah” diganti menjadi “Bintang” pada tahun 1985. Lambang Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila yang terdapat dalam “tubuh Garuda Pancasila”. Pergantian ideologi dan lambang PPP tersebut, menurut Nasir Tamara, merupakan proses deislamisasi politik dan depolitisasi Islam.<sup>61</sup>

Rangkaian tindakan rezim Orde Baru yang secara sistematis melakukan marginalisasi terhadap Islam politik tersebut sebangun dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam. Rezim Orde Baru berpandangan bahwa keterlibatan Islam dalam politik cenderung mengganggu kestabilan politik, dan karena itu mengganggu gerak pembangunan. Oleh karena itu pandangan rezim Orde Baru terhadap Islam adalah pandangan yang menganggap Islam sebagai suatu agama dalam pengertian ibadah dan soal-soal kemasyarakatan yang tidak bersifat politik praktis. Berdasarkan itu maka rezim Orde Baru akan mendukung sepenuhnya kegiatan umat Islam yang berhubungan dengan masalah ibadah dan kemasyarakatan, tetapi yang berkaitan dengan politik akan membatasinya bahkan melarangnya. Terpinggirnya Islam politik dalam percaturan nasional, ternyata membawa dampak lain bagi perkembangan Islam di Indonesia. Artinya, meskipun perkembangan Islam dalam bidang politik kurang

---

<sup>61</sup>Nasir Tamara, *Sejarah Politik Islam Orde Baru* (Jakart: Prisma, 1988),h. 45.

menggembirakan akibat serangkaian kebijaksanaan yang dilakukan rezim Orde Baru, tetapi dalam dimensi ritual dan kemasyarakatan mengalami perkembangan yang pesat. Ini dapat dilihat dengan semakin maraknya kehidupan keagamaan, seperti semakin meningkatnya orang pergi haji dari kalangan priyayi, banyaknya bangunan masjid, banyaknya kelompok studi Islam, dan lain-lain. Sehingga akibat berkembangnya kegiatan keagamaan tersebut, menurut Kuntowijoyo, telah terjadi konvergensi di kalangan kaum santri dan kaum abangan, antara tradisional dan modernis.<sup>62</sup> Maraknya kehidupan keagamaan tersebut dampak dari gerakan Islam kultural. Gerakan ini menawarkan wacana bahwa gerakan Islam tidaklah harus berkutat dalam dataran politik, tetapi dalam dataran kultural. Dengan Islam sebagai gerakan kultural maka Islam hadir dalam kehidupan bernegara sebagai nilai dan sumber etik. Dengan dikembangkannya pendekatan Islam kultural bukanlah berarti mengosongkan sama sekali ruang kesadaran umat dari politik. Kesadaran politik tetap ada dan dikembangkan, hanya saja ia tidak terpusat dalam bentuk politik praktis yang bersifat temporer, jangka pendek, dan secara sempit mengembangkan politik partisan. Dalam konsep Islam kultural, *power politics* bukanlah satu-satunya alternatif bagi perjuangan Islam di Indonesia. Tersedia berbagai peluang dan sarana bagi keberhasilan perjuangan umat Islam, antara lain melalui dakwah, pendidikan, sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

#### **D. Munculnya Partai Politik Islam Era Reformasi**

Dengan berkembangnya gerakan Islam kultural pada masa Orde Baru, banyak pengamat menilai bahwa kekuatan

---

<sup>62</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Jakarta: Logos, 1994), h. 34.

Islam politik tidak akan muncul lagi. Apalagi setelah PPP sebagai satu-satunya representasi kekuatan Islam politik sudah menanggalkan asas Islam dan menerima asas Pancasila. Taufik Abdullah mengatakan bahwa dengan PPP menerima Pancasila sebagai asasnya maka hal itu merupakan “halaman akhir Islam politik di Indonesia”. Dengan analisis yang berbeda namun dalam format yang sama dinyatakan pula oleh R. William Liddle dalam tulisannya yang berjudul *Skripturalisme Media Dakwah*. Dalam tulisan ini ia mengemukakan tesis bahwa kelompok skripturalisme (kelompok Islam formalistik) tidak akan berkembang, hal ini karena ada tiga hambatan yang akan dihadapi, yaitu: (1) Komunitas abangan, yang meski semakin sedikit namun masih tetap vital; (2) Santri tradisional yang tetap akomodasionis, dan (3) Kalangan modernis sendiri.

Tesis Liddle itu memang ditulis saat mesra-mesranya “bulan madu” antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Semua orang pun, saya kira, akan setuju dengan tesis tersebut. Tetapi ketika angin reformasi menerpa pemerintah Orde Baru, yang menyebabkan jatuhnya Soeharto, keberlakuan tesis tersebut menumbuhkan pertanyaan: apakah masih relevan tesis tersebut? Hal itu karena pada masa pasca Orde Baru ini telah muncul partai-partai politik Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pasca Orde Baru, akibat gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, telah terjadi ledakan partisipasi politik. Ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan masa akar rumput tetapi juga menghinggapi kalangan elite politik. Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elite politik berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai politik, tak terkecuali elite Islam. Partai-partai politik Islam yang muncul pada era reformasi ini mencapai 32, dan dari jumlah tersebut yang lolos Pemilu 1999 sebanyak 17 partai, yaitu PPP, PBB, PK, PUI, PSH, PSII 1905,

PNU, PKU, Partai Politik Islam Masyumi, PMB, PAY, PID, PDB, KAMI, PP, PUMI, dan Partai SUNI.<sup>63</sup>

Fenomena berdirinya partai-partai politik, khususnya yang berbasis Islam, dianggap sebagai bangkitnya politik aliran. Dikatakan sebagai bangkitnya kembali politik aliran karena selama Orde Baru, politik aliran diberangus. Pada masa itu, rezim Orde Baru melakukan kebijakan dealiranisasi dengan serangkaian kebijakan: depolitisasi massa, *floating mass*, dan de ideologisasi dengan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Kini setelah rezim Orde Baru jatuh, aliran-aliran politik itu, termasuk aliran politik Islam, bangkit kembali dengan wujud berdirinya partai-partai politik Islam. Sehubungan dengan itu, Th. Sumartana mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berdasarkan agama. *Pertama*, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan gagasan-gagasan keagamaan yang dipercayai. *Kedua*, karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok agama tersebut. *Ketiga*, karena umat agama tersebut merasa lebih nyaman dengan pemimpin politik yang lahir dari komunitasnya sendiri dan tidak percaya manakala politik dikuasai oleh golongan agama lain. Dalam konteks berdirinya partai-partai Islam era reformasi ini ada beberapa hal sebagai penjelas. Berdirinya partai-partai Islam berkaitan dengan realitas sosial yang menjadi tempat hidup umat, yang tidak ada jalan untuk menghadapinya kecuali dengan memberi kesempatan bagi munculnya partai Islam. Di sana terdapat kaidah agung dari kalangan masyarakat, yang membentuk kehidupan mereka di

---

<sup>63</sup>Liddle, R. William, *Islam, Politik dan Modernisasi* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 78.



bawah naungan ajaran-ajaran Islam. Partai Islam merupakan bentuk yang terkonsep dalam aktivitas politik agama untuk mengekspresikan keinginan tersebut.

Berdirinya partai-partai Islam berkaitan juga dengan realitas ideologis. Realitas ini yang mengharuskan pembentukan partai Islam. Seorang muslim dalam kehidupan praktisnya diberikan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan kecuali melalui sistem kehidupan Islami. Untuk sampai pada tujuan tersebut maka harus diberikan kesempatan untuk merealisasikan programnya dengan cara yang dapat diterima baik dari segi politik maupun demokrasi. Di samping itu, seorang muslim berkecimpung dalam aktivitas politik merupakan bagian dari ketaatan pada agama. Hal ini berbeda dengan agama Kristen, yang membedakan antara aktivitas agama dan dunia. Dalam Islam, bagi seorang muslim yang sejati adalah yang memenuhi tuntutan-tuntutan agamanya dan sekaligus dunianya. Dalam konteks ini maka partai Islam mendapatkan dalam ajaran-ajaran Islam kandungan akidah yang mewarnai program politik, ekonomi dan sosial yang dicanangkan.<sup>64</sup> Selain itu, pembentukan partai Islam juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam negara yang menganut demokrasi, setiap kelompok maupun golongan diakui keberadaannya untuk membentuk organisasi kekuatan politik yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. Hal ini didukung pula dengan perundang-undangan di mana tidak ada larangan membentuk partai politik berdasarkan agama asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Keberadaan partai Islam tentu saja tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi dilihat dari tujuan dan program

---

<sup>64</sup>Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), h. 407.

pendirian partai Islam tidak ada yang menyebutkan mereka akan mendirikan negara Islam atau mengganti ideologi Pancasila. Dengan demikian keberadaan partai Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nurcholis Madjid sangat menyayangkan dengan berdirinya kembali partai-partai Islam. Bahkan lebih jauh Ia mengatakan bahwa pendirian partai-partai Islam tersebut sebagai gejala tumbuhnya komunalisme. Penilaian Nurcholis seperti itu bisa dipahami. Hal ini karena selama ini ia dikenal sebagai orang yang berpandangan tidak perlu adanya partai politik Islam. Slogan yang terkenal adalah: *Islam Yes. Partai Islam No. 21*. Sementara di kalangan non-Islam, dengan berdirinya partai-partai Islam ternyata menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Ini tercermin dari tulisan Th. Sumartana dan Frans Magnis Suseno. Dalam tulisannya Sumartana mengatakan bahwa bisakah partai Islam yang muncul saat ini memberikan payung bagi golongan minoritas dan memberi jaminan tidak akan ada perlakuan diskriminatif kepada golongan-golongan minoritas. Ia berpendapat bahwa banyak kesangsian tergambar dalam diskursus tentang nasib masa depan golongan minoritas. Ia bertanya: "Jika Islam berkuasa apakah ada jaminan bagi tempat, kedudukan serta peran mereka di masyarakat dan negara di masa depan? Apakah hak-hak mereka terlindungi? Apakah kesetaraan akan dijamin? Frans Magnis Suseno juga khawatir akan munculnya kembali gagasan negara Islam. Menurutnya, bila gagasan negara Islam muncul kembali merupakan pertanda kemunduran dalam proses modernisasi bangsa, suatu gejala yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Di Indonesia, memang golongan non-Muslim terutama Kristen dan Katolik khawatir dengan gagasan negara Islam. Kekhawatiran ini bisa dimengerti karena memang dalam

sejarah politik di Indonesia partai-partai Islam pernah memperjuangkan dasar negara Islam. Oleh karena itu ketika Indonesia pasca Orde Baru ini berdiri partai-partai Islam, mereka merasa khawatir jangan-jangan sejarah berulang kembali di mana partai-partai Islam akan kembali memperjuangkan dasar negara Islam. Benarkah demikian?

### **E. Ranah Perjuangan Piagam Jakarta**

Pada era reformasi ini partai-partai Islam yang menekankan pendekatan formalistik memperjuangkan kembali Piagam Jakarta dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 2000. Namun partai Islam yang memperjuangkan Piagam Jakarta hanya PPP dan PBB serta partai-partai Islam yang tidak memperoleh kursi, seperti PUI, PSII, dan Partai Islam Masyumi; sedangkan partai-partai Islam lainnya kurang mendukung perjuangan tersebut. Apabila kita mengikuti pengelompokan partai-partai politik Islam era reformasi yang terdiri dari (1) Kelompok tradisionalis, (2) Kelompok modernis, dan (3) Kelompok *reyivalijv* maka ternyata sikap mereka terhadap Piagam Jakarta berbeda-beda.

Kemerdekaan sampai awal Orde Baru, kini pada era reformasi ini (pada ST MPR 2000) tidak lagi memperjuangkan Piagam Jakarta. Bukan hanya itu saja bahkan kelompok ini sebagai salah satu kelompok yang menentang masuknya kembali Piagam Jakarta. Bagi kelompok tradisionalis perjuangan memasukkan kembali Piagam Jakarta adalah sesuatu yang *setback*. Dengan tidak lagi memperjuangkan kembali atau menolak Piagam Jakarta tersebut berarti kelompok Islam tradisionalis ini mengalami pergeseran pemikiran yang bersifat ideologis dalam melihat Islam dalam kehidupan bernegara. Padahal pada masa lalu kelompok ini termasuk yang keras memperjuangkan Piagam Jakarta. Dengan adanya pergeseran ini maka meskipun mereka secara formal

membentuk partai-partai politik Islam, tetapi dengan demikian pembentukan itu tidak ada kaitannya dengan usaha mendirikan atau memperjuangkan kembali Piagam Jakarta. Pembentukan partai-partai Islam, dengan demikian, hanya berkaitan dengan upaya representasi kekuatan Islam dalam parlemen atau eksekutif. Berbeda dengan kelompok tradisionalis yang menentang Piagam Jakarta, maka bagi kelompok Islam fundamentalis (PK) adalah meskipun mendukung Piagam Jakarta masuk dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945, tetapi dukungan itu dalam arti substansi bukan bentuk (kata). Oleh karena itu yang diperjuangkan kelompok fundamentalis bukan Piagam Jakarta *an sich*. Karena bagi kelompok ini persoalan bahasa (istilah atau kata Piagam Jakarta) bisa dicari solusinya, yang penting adalah isi dari pasal tersebut. Dalam konteks itu kelompok ini lalu mengusulkan bentuk kompromi, yaitu dengan mengusulkan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing”.

Berbeda dengan kedua kelompok di atas, kelompok modernis tetap berusaha memperjuangkan Piagam Jakarta. Dalam arti kelompok ini dari dulu hingga saat ini tetap memperjuangkan Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945. Oleh karena itu ketika ada Amandemen UUD 1945, mereka mengusulkan agar Piagam Jakarta masuk dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945. Kelompok ini, baik yang ada di dalam MPR, yaitu PPP dan PBB, maupun yang tidak memperoleh kursi di MPR seperti PUI, Partai Islam Masyumi, PSII, dan lain-lain terus berusaha berjuang agar Piagam Jakarta masuk dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945. Sikap kelompok modernis yang tetap memperjuangkan kembali Piagam Jakarta ini menunjukkan konsistensi perjuangan mereka. Apabila kelompok tradisionalis berhenti dalam memperjuangkan

Piagam Jakarta, maka kelompok modernis dari semenjak awal kemerdekaan hingga era reformasi ini tetap terus memperjuangkan Piagam Jakarta. Namun demikian dalam memperjuangkan Piagam Jakarta tersebut terdapat pergeseran. Artinya perjuangan mengusulkan kembali Piagam Jakarta bukan dalam rangka ingin mendirikan negara Islam. Kelompok ini tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, Piagam Jakarta cukup masuk dalam Pasal 29 Ayat (1), tidak dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun dalam memperjuangkan kembali Piagam Jakarta, baik PPP maupun PBB tidak merumuskan secara jelas dan sistematis mengenai bagaimana pendirian itu diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah nanti Piagam Jakarta mengatur hukum perdata dan pidana, atau hanya perdata saja. Atau lebih luas dari itu. Hal-hal itu tidak dikemukakan oleh PPP dan PBB dalam memberikan alasan memasukkan kembali Piagam Jakarta pada UUD 1945. Di samping itu juga mereka tidak menjelaskan bagaimana cara menjabarkan Piagam Jakarta apabila dipraktikkan. Akibat tidak ada penjelasan itu terdapat kesan bahwa memperjuangkan Piagam Jakarta hanya sekadar simbol. Kemudian muncul kesan bahwa perjuangan PPP dan PBB tersebut adalah dalam upaya “politik pencitraan”, yang menunjukkan bahwa mereka adalah partai politik Islam. Terlepas dari hal tersebut perjuangan kelompok modernis dalam memperjuangkan Piagam Jakarta ini mendapat dukungan dari ormas-ormas Islam, meskipun ormas Islam kecil dan Partai-Partai Islam yang tidak memperoleh kursi. Tetapi mereka tidak mendapat dukungan dari kelompok tradisionalis dan fundamentalis. Di samping itu kalangan Islam substansialistik (PAN dan PKB) dan ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta beberapa tokoh gerakan Islam kultural, seperti Nurcholis Madjid, tidak mendukung dan

menolak Piagam Jakarta yang diperjuangkan oleh kalangan modernis. Memang, persoalan hubungan agama (Islam) dan negara di dunia Islam, masih belum selesai. Di kalangan pemikir Islam ada tiga pandangan tentang hubungan agama dan negara dalam dunia Islam, yaitu *integrated*, simbiotik, dan sekularistik. Ketiga pandangan tersebut mewarnai pula padangan umat Islam Indonesia tentang hubungan agama dan negara. Di Indonesia, secara garis besar, yang kemudian terjadi benturan adalah antara pandangan *integrated* dan sekularistik. Sedangkan pandangan yang simbiotik, kemudian lebih dekat ke pandangan sekularistik dengan menggunakan pendekatan Islam kultural.

## **F. Kesimpulan**

Pada era reformasi muncul kembali partai politik yang berasas Islam (partai Islam). Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan kembali partai-partai Islam tersebut. *Pertama*, faktor teologis yang melahirkan doktrin bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan negara. *Kedua*, faktor sosiologis di mana umat Islam Indonesia mayoritas sehingga perlu adanya wadah untuk mereka. *Ketiga*, faktor historis di mana keberadaan partai Islam tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu di mana partai Islam telah ada dan ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia. *Keempat*, faktor reformasi yang melahirkan kebebasan dan demokratisasi di mana setiap golongan dan kelompok dibuka peluang untuk membentuk/mendirikan partai politik.

Namun kemunculan kembali partai politik Islam tersebut mengalami perpecahan atau fragmentasi di mana partai Islam yang dibentuk atau berdiri begitu banyak (dalam bahasa AM Fatwa, satu Islam banyak partai). Tampaknya sifat fragmentasi ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kekuatan-

kekuatan Islam di Indonesia semenjak zaman perjuangan dulu. Oleh karena itu tidak heran ketika dari kalangan Islam modernis lahir partai-partai politik seperti PBB, PUI, Masyumi Baru dan Partai Islam Masyumi (serta PAN yang tidak berdasarkan asas Islam tetapi nasionalis religius). Sedangkan dari kalangan tradisional lahir partai politik seperti PKU dan PNU (di samping PKB yang tidak berdasarkan pada asas Islam namun nasionalis-religius). Sementara dari rahim Sarekat Islam, telah lahir partai politik seperti PSII dan PSII 1905. Ketika menghadapi Pemilu 1999, partai politik Islam yang ikut pemilu adalah 17 partai.

Dari jumlah tersebut, ternyata yang memperoleh kursi hanya 7 partai politik, yaitu PPP, PBB, PK, PKU, PNU, PP, dan PSII. Dari enam partai politik itu bila dijumlah secara keseluruhan hanya memperoleh suara 17 persen. Dengan demikian partai-partai politik Islam dalam Pemilu 1999 kurang mendapat dukungan dari pemilih Islam. Malahan yang keluar sebagai pemenang adalah PDI Perjuangan, yaitu sebuah partai nasionalis sekuler. Dengan demikian partai-partai Islam mengalami kekalahan dengan partai nasionalis sekuler. Begitu pun dengan Pemilu 2004, dari lima partai Islam yang ikut pemilu hanya dua yang lolos *electoral threshold* yakni PPP dan PKS. Kekalahan partai-partai Islam itu sudah dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini karena di samping jumlah partai politik Islam yang banyak juga karena faktor elite-elite politik Islam yang mendirikan partai politik yang berorientasi nasionalis-religius dan pluralis, seperti PKB dan PAN. Kedua partai tersebut mempunyai basis yang kuat dan besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Selain itu juga, di kalangan umat Islam telah terjadi perubahan ideologis di mana mereka lebih melihat substansi Islam daripada formalisme Islam dalam bentuk partai Islam.

Argumentasi tersebut di atas semakin mendapat justifikasi, terlihat dari menurunnya dukungan umat Islam terhadap PPP dan PBB, padahal kedua partai ini mengusung syari'at Islam dalam perjuangannya. Sementara itu, PKS meski sebagai partai Islam tidak mengusung tema-tema Islam yang membuat orang takut tetapi pada tema-tema yang selama ini menjadi perhatian masyarakat luas, yaitu pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, penegakan keadilan dan kejujuran. Kenaikan suara PKS pada Pemilu 2004, saya kira tidak lepas dari strategi tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan, tema-tema yang bersifat keagamaan tampaknya kurang menarik lagi bagi pemilih Islam, sebaliknya menginginkan tema-tema yang berkaitan dengan persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat selama ini.



## Daftar Pustaka

Syafii, Anwar, M. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta, Paramadina, 1995.

D.Z. Abdul Mu'nim. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta, Kompas, 2000.

Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam*. Jakarta, Mizan, 1986.

Eickelman, Dale F. dan James Piscatori. *Ekspresi Politik Muslim*. Bandung, Mizan, 1998.

El-Affendy, Abdel wahab. *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*. Yogyakarta, LKiS, 1994.

Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.

Harahap, Syahrin. *Al-Qur'an dan Sekulerisme: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thoha Husein*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Liddle, R. William. *Islam, Politik, dan Modernisasi*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Mulkham, Abdul Munir. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Jakarta: Logos 1994.

Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafitipers, 1987.

Syamsuddin, Din “Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”. *Ulumul Qur’an*, 1993.

Tamara, Nasir. *Sejarah Politik Islam Orde Baru*, Prisma, No.5/1988.

Tim Kompas. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

# Islam di Persimpangan Jalan: Tauhid dan Pembelaan Umat Islam

## A. Tauhid Sebagai Nilai Dasar Dinamisasi Kehidupan: Suatu Pengantar

Agama mengajarkan pemeluknya untuk berdamai dengan semesta agar perlakuan ini menjadikannya sebagai poros kedamaian sehingga segala sesuatu dapat selamat sejahtera tunduk dan patuh terhadap keseluruhan tatanan yang menjadi unsur Agama itu berdiri di tengah peradaban semesta dan manusia khususnya (*Al Islam*). Dalam definisi yang menjadi tujuan utama agama ini mengatakan siapa pun yang tetap berpegang teguh terhadap dinamisasi ajarannya secara *furuiyyah* akan terus bertahan dan tumbuh secara kolektif menjadi bangsa yang terkuat di bumi ini, dengan satu syarat bahwa keseluruhan tatanan yang membentuk ajaran agama ini menjadi sebuah perangkat-perangkat teknis yang solutif di tengah dinamika kehidupan manusia.

Sejak Nabi Muhammad dalam Periode Makkiah beliau meletakkan dasar-dasar Tauhid yang representatif sistematis dan logis dalam bangunan narasi argumentasi yang kuat, seperti logika yang digambarkan dalam Alquran mengenai gagasan yang disampaikan tentang Tuhan, Q.S. Al-Maidah: 76

*Artinya: Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" Dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Dalam firman tersebut Allah Swt. meletakkan dasar tauhid yang logis kepada Muhammad untuk diajarkan kepada

umatnya sehingga nilai tauhid yang mendasar tersebut seharusnya menjadi energi dalam membangun peradaban dunia yang dinamis. Tauhid yang diajarkan oleh Muhammad kepada umatnya seharusnya membebaskan belenggu dari tuhan-tuhan lain yang purba (animisme, dinamisme, politeisme), juga Tuhan-tuhan modern yang berhasil melebur dalam gaya hidup manusia (harta, pangkat, jabatan, dan sebagainya), menuju kepada Tuhan yang esa sebagai afirmasi dari Tuhan-Tuhan yang tidak mampu memberi mamfaat apapun kepada manusia, dan atau kemanfaatan yang semu, fana dan bersifat sementara tersebut.

Dalam setiap narasi kehidupan, implementasi nilai-nilai tauhid akan senantiasa menjadi variatif dan dinamis. Dalam konteks ini, pergesekan-pergesekan kerap kali terjadi baik itu dalam level terendah sampai kepada konflik yang meluas dan tak jarang menjadi sebuah problem besar antara umat beragama. Persoalan tersebut menjadikan peran dan eksistensi nilai-nilai Tauhid semakin penting dan mendesak untuk senantiasa dikaji ulang menjadi sebuah tema besar dalam setiap pertemuan-pertemuan keagamaan, pertemuan-pertemuan aliaran-aliran dalam agama itu sendiri, majelis-majelis taklim dan lain-lain.

Tauhid tidaklah sebuah tema besar yang rumit dan tinggi sehingga bahasan ini menjadi semakin ditinggalkan dan mengakibatkan tingkat kepahaman umat akan pentingnya tauhid dalam kehidupan ini semakin menurun. Akhir-akhir ini tingkat profetisasi agama kian mengalami tantangan seiring menguatnya tingkat konservatisme dalam beragama. Hal ini dapat dianggap baik, jika saja arus konservatif tersebut berasal dari nilai-nilai tauhid yang komprehensif sehingga dalam gerakannya akan menjadi sumber tatanan pembentukan moral, norma sosial. Namun ia akan menjadi sumber masalah jika arus

konservatif tersebut berasal dari pemahaman-pemahaman dan pemaknaan Agama secara lateral saja, kaku dan mengikat sehingga secara otomatis akan selalu saja berbenturan dengan budaya-budaya manusia yang dinamis dan berkembang.

## **B. Distorsi Kalimat Tauhid dalam Perspektif Politik**

Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh pembakaran Bendera Tauhid yang dilakukan oleh oknum BANSER NU Garut yang berujung kepada konflik sosial yang melebar menjadi isu nasional. Dengan dalih adanya indikasi bendera HTI. Oknum BANSER tersebut membakar sepotong bendera yang bertuliskan kalimat tauhid.

Kejadian tersebut memancing reaksi dari berbagai kalangan, sebahagian besar masyarakat mengecam keras tindakan oknum Banser tersebut sehingga memicu masyarakat untuk melakukan unjuk rasa dengan tema “Aksi Bela Kalimat Tauhid” yang digelar pada masing-masing daerah di seluruh pelosok negeri.

Kejadian tersebut menjadi sebuah catatan bagi bangsa ini bagaimana urgensinya eksistensi Tauhid dalam karakteristik kepribadian Muslim secara utuh. Seperti sebuah energi magnetik, kalimat tauhid yang menjadi simbol dari keseluruhan marwah agama Islam ini, dapat menyerap semangat keseluruhan kaum Muslimin, dari yang taat sampai pada penganut Islam yang tidak taat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajarannya, sehingga pada titik spektrum yang sama, mereka menyatu berdasarkan semangat yang sama dalam konteks pembelaan kalimat tauhid berdasarkan keyakinan yang kuat.

Dalam konteks *ghirah* perjuangan dan semangat yang besar ini merupakan sebuah kekuatan besar dalam arus besar kekuatan kaum Muslimin di mata dunia secara kuantitas.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terbesar jumlah penganut agama Islam di dunia sehingga sudah sewajarnya ini menjadi semacam agenda “Standar Prioritas” dalam dunia politik khususnya yang dilakukan oleh orang-orang, instansi atau lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan politik terhadap bangsa ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa politik memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teologi Islam berkaitan dengan eksistensi tauhid yang menjadi inti dasar dalam ajaran Islam itu sendiri untuk masa selanjutnya. Dalam kajian historis, sejak kepergian Kanjeng Nabi Muhammad ﷺ pergesekan-pergesekan kepentingan tentang siapa yang berhak memegang tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah wafat mulai timbul, sejak pengangkatan ke empat khalifah, memiliki ragam dan cara yang berbeda, dalam hal ini Hitti menjelaskan secara deskriptif tentang dinamisasi yang ditawarkan Islam dalam memilih Imamah secara politis.

Istilah Khalifah Rasul Allah (Penerus Rasul Allah), dinisbahkan kepada Abu Bakar dan dia tidak menggunakan istilah tersebut karena di dalam Alquran istilah Khalifah hanya muncul dua kali yang keduanya tersebut tampaknya menjelaskan tidak secara teknis diperuntukkan untuk diterapkan kepada penerus Muhammad, pada periode Umar bin Khattab setelah Abu Bakar dalam proses penunjukan langsung oleh Abu Bakar, beliau pernah menggunakan istilah *Khalifah khalifah* (penerus penerus Rasul Allah) dan terlalu panjang maka gelar itu diperpendek dan diberi gelar *Amirul Mukminin* (panglima orang beriman) menjelang wafatnya Umar, diriwayatkan membentuk Tim Formatur yang beranggotakan enam orang: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Talhah Ibnu Abdullah, Sa’ad bin Abi Waqas dan Abdurrahman bin ‘Auf dan disebut sebagai Dewan Syura.

Senioritas kesukuan menjadi penentu terpilihnya Utsman bin Affan, setelah Utsman Wafat secara Otomatis, Ali bin Abi Thalib terangkat sebagai khalifah ke empat dan seluruh dunia Islam mengakui kekhalifahannya.<sup>65</sup>

Gambaran tersebut memberikan pemahaman yang jelas bahwa dinamisasi sistem yang dilakukan oleh para sahabat dalam proses imamah menggantikan kepemimpinan Rasulullah cukup variatif, hal inilah yang menjadikan bahwa Islam sangat signifikan untuk dijadikan *Moral force* dalam berpolitik etis dan berkeadilan selagi prinsip-prinsip tauhid yang mengandung nilai universal itu tertanam jelas secara komprehensif di tengah umat, seperti yang telah sukses dipraktikkan para sahabat sepeninggalan Rasul.

Fouda secara dramatis deskriptif menunjukkan contoh dari aspek-aspek fondasi Islami yang dilakukan para khalifah yang sukses diterapkannya pada masyarakat ketika itu:

“Demikianlah tentang masyarakat Islam pada masa itu. Adapun soal syariat Islam, tidak ada yang meragukan bahwa pada masa keduanya itu (Abu Bakar dan Umar-pen) syariat ditetapkan secara penuh. Bahkan jangan kaget jika saya mempermaklumkan bahwa masa-masa itu adalah masa-masa cemerlang dalam penerapan syariat Islam. Penerapan syariat jika ditinjau dari sifat pemimpin dan kondisi masyarakatnya waktu itu, seperti mewajibkan sesuatu yang tidak perlu diwajibkan lagi, karena semua masyarakat sudah melaksanakannya.”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Philip K Hitti, *History of Arab*, (Terjemahan) (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 223.

<sup>66</sup>Farag Fouda, *Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim*, terj. Novriantoni (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 2003), h. 24.

Deskripsi itu menggambarkan bahwa, prinsip tauhid yang terintegrasi secara komprehensif dalam karakteristik umat ketika itu menjadikan syariat Islam bukan lagi sebagai hukum yang harus dipatuhi, bukan sebuah gagasan yang berangkat dari ketidakadaan sebelumnya, namun ia sudah menjadi sebuah realitas dan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Namun hari ini negara-negara Islam di semenanjung Arab dan wilayah-wilayah lainnya gagal menerapkan *Khilafah Islamiyah* yang hanya menghadirkan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan, seperti Iraq, Iran, Suriah, Palestina dan negara-negara mayoritas Islam lainnya. Sampai saat ini dapat diakui bahwa tidak ada yang berhasil dengan tegas menunjukkan pola *khilafah Islamiyah* yang berhasil menciptakan keadilan dan perdamaian dunia, dengan menunjukkan negara manakah yang dapat menerapkannya secara sukses.

Ini terjadi karena berkembangnya sikap konservatisisme dalam beragama yang melihat agama dari sisi lateral saja. Kondisi tersebut malah menimbulkan desaklarisasi Agama, karena agama berkembang menjadi alat politik dalam menguatkan kekuasaan hegemoni tertentu.<sup>67</sup> Sehingga dalam tataran praktis nilai-nilai idealisme yang dipaku mati tersebut akan senantiasa berbenturan dengan realitas kehidupan. Lebih lanjut Fouda menunjukkan salah satu contoh nilai-nilai idealisme yang tidak bersahabat dengan realitas:

“Ini belum lagi ditambahkan persoalan lain yang ruwet seperti soal perumahan. Persoalan-persoalan seperti

---

<sup>67</sup>Waito Raharjo, “Agama dan Politik; Teologi Pembebasan Sebagai Arena dalam Profetisasi Agama”, dalam *Walisono* Vol. 22, h. 133.



ini belum ada di dalam pembahasan fiqh ulama-ulama terdahulu, misalnya, apa hukum rumah sewa dan kredit perumahan? Perkara seperti ini pada akhirnya membuat para ulama terjebak pada pertengkaran antara sesama mereka dan dengan pakar-pakar bidang lainnya di dalam masyarakat. Dalam perkara undang-undang keluarga misalnya, para ulama memang dapat menemukan rujukan mereka baik dari Imam Malik maupun Abu Hanifah, jika tidak menemukan keduanya mereka dapat merujuk kepada ulama yang tidak sepopuler keduanya, seperti Sahl bin Muawiyah. Namun yang pasti, mereka tidak pernah berpendapat melampaui ulama-ulama abad kedua Hijriah itu.”<sup>68</sup>

Dalam persoalan yang lebih kompleks lagi, akan lebih banyak ditemukan kasus-kasus yang tentunya tidak pernah ditemukan pada abad kedua Hijriah tersebut, seperti soal investasi di sektor badan Usaha Milik Negara, yang ditopang investor dari bank-bank yang konvensional dalam bentuk deposito yang tentu saja menjanjikan bunga. Ijtihad fiqh abad kedua hijriah belum menemukan hal tersebut sehingga dalam batas ini seharusnya diperlukan proses maksimalisasi ijtihad yang melibatkan para pakar yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Kasus pembakaran Bendera dan aksi bela Kalimat tauhid di atas memberikan masing-masing pemahaman bahwa yang pertama, tindakan BANSER merupakan sebuah tindakan yang tidak bisa ditolelir sebagai perlakuan yang beradab baik dan beretika, seperti dalam keterangan Tuan Guru Bajang (TGB) melalui vlog yang diunggahnya dalam akun media sosial,

---

<sup>68</sup>Fouda, *Kebenaran*, h. 12.

menyatakan jika benar dugaan tersebut adalah bendera HTI harusnya tindakan BANSER cukup melipat dan menyerahkan kepada yang berwajib. Secara adat satu sisi tindakan ini tidak layak dibenarkan.

Namun di sisi lain, dapat juga dipahami bahwa, dasar pemikiran sahabat-sahabat BANSER melakukan hal itu sesungguhnya berikhtiar ingin meluruskan nilai-nilai dasar Tauhid yang universal tidak terkotori oleh kepentingan-kepentingan politis yang justru mengakibatkan proses desakralisasi agama semakin kuat seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Kedua, Aksi bela tauhid yang dilakukan sebahagian umat Islam saat ini merupakan bukti bahwa kalimat tauhid merupakan perekat dan pemersatu umat secara kasat mata dan kuantitas. Itu dapat dilihat ketika aksi yang dilakukan kemarin, umat Islam dari segala penjuru berkumpul dan bersatu dalam satu kalimat tauhid. Namun seyogyanya aksi bela kalimat tauhid hendaknya dimotori dan dinapasi oleh nilai-nilai tauhid yang komprehensif murni dari kepentingan-kepentingan politik.

Secara filosofis, seperti pada uraian terdahulu, esensi pembelaan kalimat tauhid bukan hanya terpaut pada teks, melainkan diperjuangkan melalui nilai-nilai kebaikan sosial individual yang terinternalisasi dalam kerja-kerja kemanusiaan yang tersimpul sebagai *Amal Sholih*, dalam setiap teks alquran, tauhid (Iman) selalu dibarengi dan dirangkai dengan kerja sosial dan kemanusiaan (Amalan sholeh) *Alladzina aamanu wa 'amilu sholihah*.

Artikel yang dituliskan ini tidak bermaksud membela golongan-golongan yang saling bertikai melainkan berusaha memberikan gambaran yang utuh dalam perspektif yang lain secara objektif logis dan rasional terhadap persoalan di atas, karena setiap persoalan, apapun itu bahasan dan temanya,

dapat dianalisis dari berbagai frame dan sudut pandang tertentu, dan tentunya saling berbeda antara satu sama lain.

Seperti sebuah cerita tamsilan, beberapa orang buta yang sedang menerka gajah, dapat dipastikan akan menghasilkan sebuah konklusi yang berbeda-beda dalam menjelaskan hakikat gajah itu sesungguhnya. *Tentunya pemahaman kita bukan seperti seekor Gajah.*

## Daftar Pustaka

Hitti, Philip K. *History of Arab*, (Terjemahan). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Fouda, Farag. *Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim*, terj. Novriantoni. Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 2003.

Waito Raharjo, “Agama dan Politik; Teologi Pembebasan Sebagai Arena dalam Profetisasi Agama”, dalam *Walisongo* Vol. 22.

## Profil Penulis



**Dedi Sahputra Napitupulu** lahir di Lau Garut sebuah desa terpencil di ujung perbatasan Tanah Karo (Provinsi Sumatera Utara) dengan Aceh Tenggara pada tanggal 23 Maret 1994. Lulus S1 Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara tahun 2016, satu setengah tahun kemudian menyelesaikan S2

Pendidikan Islam (PEDI) pada Pascasarjana di Universitas yang sama. Pendidikan Agama diperolehnya pertama kali dari kampung yang berpenduduk minoritas Muslim. Realitas tersebut yang kemudian mengantarkannya untuk belajar Agama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabanjahe untuk kemudian berlanjut ke Madrasah Aliyah Negeri pada tempat yang sama pula.

Aktivitas organisasinya berawal dari bendahara umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Medan, pernah menjadi sekretaris Lembaga Pendidikan dan Dakwah Kota Medan, dan saat ini menjabat sebagai wakil sekretaris Pimpinan Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kab. Karo. Beliau juga aktif pada kegiatan akademis, beberapa kegiatan yang pernah diikuti adalah *Study visit to International Islamic University Malaysia* (IIUM) tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 juga mengikuti acara yang sama dikampus *University Sains of Malaysia* (USM), masih pada tahun yang sama beliau juga turut serta pada kegiatan *Study Visit to Prince of Songkhla University Thailand*, menyampaikan *paper* pada *Multidisiplinary International Conference on Sharia-Based Applied Sciences and Humanities (MICASH) 2018 UIN Sumatera Utara Medan*.

Beberapa karya yang telah diterbitkan di antaranya adalah:

1. Esai-Esai Totalitas Mahasiswa (Medan: Al-Hayat 2016);
2. Refleksi Kehidupan (Medan: Al-Hayat 2017);
3. Kompetensi Kepribadian Guru PAI (Pati: Fire Publisher, 2018);
4. Madrasah Ramah Lingkungan (Medan: Widya Puspita, 2018).

Selain buku, beliau juga rajin melakukan penelitian, di antara penelitian yang berhasil dimuat dalam jurnal adalah:

1. Kompetensi Kepribadian Guru PAI: Upaya Meningkatkan Ranah Afektif Siswa, dalam (Jurnal Tazkiya, 2016);
2. Esensi Alam Semesta Perspektif Filsafat Pendidikan Islam, dalam (Jurnal Tazkiya, 2017);
3. Lembaga Pendidikan Tinggi Al-Azhar: Mengenang Peradaban Islam Masa Fatimiyah, dalam (Jurnal Jurnal Sejarah Pendidikan Islam, 2017);
4. Nilai-nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Adam, dalam (Jurnal Tadris, 2018);
5. Inovasi Pendidikan Islam Pada Dayah Terpadu, Studi Pada Dayah di Kab. Bireun, dalam (Jurnal Edukasi, 2018);
6. Implementasi Program Cinta Lingkungan di MAN 2 Model Medan, dalam (Jurnal At-Tazakki, 2018).

Selain sebagai peneliti beliau juga aktif menulis di koran dan majalah, beberapa tulisan dalam bentuk artikel yang pernah di publikasikan adalah:

1. Antara Pernikahan Dini dan Ambisi Meraih Prestasi (Dinamika: Januari, 2015);
2. Birokrasi dan Pesan Kemanusiaan (Dinamika: Januari, 2016);
3. Koreksi Terhadap Khatib Jumat Menuju Perubahan Umat (Warta Indonesia, Juni 2016);
4. Optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Warta Indonesia, Juli 2016);
5. Revolusi Belajar (Warta Indonesia, Juli 2016);
6. Negeri Formalitas (Warta Indonesia, Juli 2016).

Contact :

HP/WA : 0812 6331 0521

Facebook : Dedi Sahputra Napitupulu

Instagram : @dedi\_sahputra\_apitupulu

Email : dedisahputra\_napitupulu@uinsu.ac.id



**Rahmat Asri Sufa** adalah mahasiswa aktif program magister Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Lahir di Matangglumpangdua, Kabupaten Bireuen pada 06 Januari 1994. Rahmat terlahir dari ayah yang bernama *Sudirman Jalil* dan Ibu *Fatimah*. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, adapun kedua adiknya bernama Rahmat Auliya Sufa (alumni D IV Politeknik Negeri Lhokseumawe) dan Nurfajri Sufa (mahasiswa aktif UIN Ar-Raniry, Banda Aceh). Rahmat merupakan *entrepreneur* dan *organisator* muda berbakat, pendiri *Sufa Education Center* dan Founder *Rencong Community Organizer*.

Adapun berbagai organisasi yang pernah digeluti Rahmat Asri Sufa diantaranya :

1. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bireuen,
2. Wakil Ketua FOSREM SMA Negeri 1 Bireuen,
3. Pemimpin Redaksi Majalah Smansa Bireuen,
4. Ketua PK PII SMA Negeri 1 Bireuen,
5. Wakil Ketua OSIS Se Aceh (2012)
6. Komandan Brigade PII Kota Medan
7. Ketua Umum Indonesia Entrepreneur Club (IEC) Aceh
8. Penggagas sekaligus Ketua Forum Mahasiswa Aceh (FORMA)
9. Ketua Forum Mahasiswa Peduli Sesama (FMPS) Medan
10. Ketua Umum Ikatan Penulis Muda Indonesia (IPMI) Sumut
11. Ketua BPC HIPMI PT Kabupaten Bireuen
12. Ketua Kompartemen External HIPMI PT Aceh
13. Ketua Bidang Pemuda dan Kemahasiswaan FKMB Medan
14. Sekbid Litbang DPP IPTR Sumut
15. Ketua Umum Forum Kajian Islam (FKI) Sumatera Utara
16. Pembina Komunitas Sosial SAHABAT RAS



17. Bendahara Eksekutif Tamaddun Institute
18. Ketua Generasi Muda Demokrat (GMD) Bireuen
19. Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Bireuen

#### PRESTASI / KARYA :

1. Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) Angkatan 8, Jakarta
2. Penggagas TOEFL Akbar Serentak di 5 Kab/Kota Se Provinsi Aceh
3. Inisiator Gerakan Wakaf 1000 Kitab & Buku Islami Se Provinsi Aceh
4. Peneliti Inovasi Lembaga Pendidikan Dayah, Aceh
5. Management Delegation Study Visit to Prince of Songkla University, Thailand
6. Youth Exchange to University Sains Malaysia (USM), Malaysia
7. Editor Buku 'Essai-Essai Totalitas Mahasiswa'
8. Penulis Buku 'Refleksi Kehidupan'
9. Sejak 2013 aktif sebagai Pembicara pada Seminar Motivasi, Kepemudaan, Kepemimpinan, dan Sosial Kemasyarakatan

#### CONTACT :

Hp. : 0812 6331 0521  
WhatsApp : 0822 7208 6076  
Facebook : Rahmat Asri Sufa  
Fanspage : Rahmat Asri Sufa  
Instagram : @rahmatsufa  
Email : 1. [Rahmatasrisufa94@gmail.com](mailto:Rahmatasrisufa94@gmail.com)  
2. [Rahmatasrisufa@ymail.com](mailto:Rahmatasrisufa@ymail.com)